



EVALUASI

PELAKSANAAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB TRIWULAN III TAHUN 2022

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2022. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sebanyak 15 indikator atau 40,54 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 8 indikator atau 21,62 persen belum mencapai target, Sisanya sebanyak 14 indikator atau 37,84 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Selain itu, capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 30 indikator atau 29,13 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 30 indikator yang lain atau 29,13 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 43 indikator atau 41,75 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

2022
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Eswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.314.948.070.058 dengan realisasi sebesar Rp. 3.028.183.475.184 atau 47,95 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan III tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 74,09 persen dengan capaian keuangan sebesar 73,75 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yang sebesar 39,66 persen untuk capaian kinerja, dan 32,99 persen untuk capaian keuangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 15 indikator atau 40,54 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 8 indikator atau 21,62 persen belum mencapai target, Sisanya sebanyak 14 indikator atau 37,84 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu

Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase Balita Stunting, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan Kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 30 indikator atau 29,13 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 30 indikator yang lain atau 29,13 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 43 indikator atau 41,75 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022.....	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022	4
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022.....	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022.....	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN III.....	30
4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022	30
4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2022	85
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	85
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah.....	90
BAB V : PENUTUP.....	182
5.1 Kesimpulan	182
5.2 Rekomendasi.....	183

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. RPKD Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun keempat penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan III Tahun 2022 mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2022 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran

(*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022;

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2022. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2022. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan III Tahun 2022. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2022 sampai Triwulan I.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi:
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
 - a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
 - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
 - c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
 - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
 - a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
 - b. Mendorong Pemerataan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat.
 - c. Memperluas Akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
 - d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2022 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;

8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;
9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2022 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53	
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43	
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08	
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
	daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.74
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68.22
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.56
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70
			Neraca pengelolaan sampah			%	85.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74.68
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45
			Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak		%	80.91	
			Rasio Elektrifikasi		%	99.88	
			Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)		%	65.80	
			Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi		%	3,0 - 4,0

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	3.00
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129.78
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173.02
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72
			Partisipasi politik masyarakat			%	84.57
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61.16
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2022 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial

102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran
Pembangunan Pada Tahun 2022**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	119.41		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	32.78	4,749,579,691	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	67.34		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,524,923,366	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	79.84		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemandapan jalan	%	85.36		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	85.36	424,968,754,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemandapan Sistem Irigasi	%	52.17		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	75.37	78,749,039,047	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	80.40	4,694,778,700	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	98.59		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	35		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	49.39		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	61.61	764,484,200	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	739,588,857,260	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,092,593,901	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	70	1,849,401,028	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	85	1,281,660,820	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	44.44	2,517,297,403	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	6.55	472,000,744	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	96	1,865,531,280	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	36.76	554,780,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	52.03	15,363,280,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,779,893,285	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	12,519,651,738	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
					Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	91,11	981,904,708	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	22,22	851,362,983	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	%		1,282,219,090	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	3,165,190,197	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	7,150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,960,960,998	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.04		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.14		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.59		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per- satuannya penduduk	%	98,80	290,696,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	216,094,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	1,042,092,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	20	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	70	5,599,748,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	55	2,058,351,845	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	25	505,798,581	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	40	493,138,545	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	85	100,214,713	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1,135,237,618	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	208,116,607	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	41,000		Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	72.43		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	163,526,294,113	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	75		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	90		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	1,391,035,404	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	90	100,000,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	85	54,518,919,382	Rumah Sakit Umum Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75	10,339,417,902	Rumah Sakit Jiwa Mutihara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	78.00	48,764,835,901	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30.99		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	11.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	70	1,844,102,816	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.74		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.95	496,806,046,231	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	94.38		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	97.57		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:12		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	696,067,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	69,288,275,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.58		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	60		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		6		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	65,788,824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	309,938,698	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	10,438,816,493	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68.22		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.56		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24.24	337,210,648	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	932,857,745	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	25	199,138,369	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	208,086,986	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	211,009,847	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	83	20,303,985,721	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	935,494,875	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17.70	699,241,612	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,703,740,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.69	892,236,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	85.00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	5,299,032,825	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	74.68		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	5	596,026,769	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100.00	863,871,915	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	90	641,960,427	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	55	888,212,883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	140,706,575	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9.5	44,798,298,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	564,947,181	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,799,889,261	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	423,050,759	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	1.99	19,956,291,589	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	65.56	79,975,449,202	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96	434,192,818	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	70	6,731,344,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.74	4,909,615,839	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	249,099	8,708,211,521	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,219,005	3,795,727,604	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.92	1,962,524,606	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	214373	1,352,738,477	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	788,655,091	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	3.5	17,873,444,354	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,479,741,066	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	79.62	300,963,367	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,778,523,930	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358,435,000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	85.00	679,047,614	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	78.45	3,337,898,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,488	163,032,669,005	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.88		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.64	643,295,009	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99.88	1,791,333,986	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	2,526,185,090	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.86		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	70	289,831,387	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,716,733,208	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	5	1,349,224,006	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	85	1,297,512,601	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,446,324,087	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,604		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	490,000,000	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	3.00		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	129.78		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	85.85	5,503,206,408	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		2,446,751,761	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		209,889,754	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		1,160,576,170	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	7.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	173.02		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	35,280,281,729	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	3.14	1,040,710,958	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	704,426,525	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6.35	1,597,038,675	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	53.53	2,647,148,104	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	17	1,232,588,784	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	51.09	1,115,004,981	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	22	337,215,751	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	22	1,139,740,311	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.05		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	506,635,309	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10.53	3,685,524,366	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	97,655,935,112	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	65	8,086,485,113	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	27		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	80		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	56.41		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	72.73	2,173,198,075	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	508,873,145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	272,477,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	3,932,903,666	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	68.96	808,702,907	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,911,317,467	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terefasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	84.57		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	90	5,153,432,345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	81.35	541,317,956	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61.16		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	80		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	2,021,592,521	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	920,503,730	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	434,995,741	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	512,037,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		727,588,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN III

4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2022

Laporan evaluasi RKPD Triwulan III merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan III Tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.314.948.070.058 dengan realisasi sebesar Rp. 3.028.183.475.184 atau 47,95 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan III tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 74,09 persen dengan capaian keuangan sebesar 73,75 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yang sebesar 39,66 persen untuk capaian kinerja, dan 32,99 persen untuk capaian keuangan. Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan urusan sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Capaian Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Triwulan III Tahun 2022

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
TOTAL				17.475.325.225.866	-	5.832.043.078.632	-	4.652.975.738.403	-	6.314.948.070.058		3.431.397.486.723	74,09	73,75
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				10.861.147.065.822		3.663.842.413.701		2.585.606.428.377	-	4.020.280.195.733		2.050.125.901.242		
PENDIDIKAN				6.176.921.737.471		2.064.831.652.520		1.626.915.245.684	-	1.623.631.575.725		1.092.248.360.999		
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				6.176.921.737.471		2.064.831.652.520		1.626.915.245.684		1.623.631.575.725		1.092.248.360.999		67,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	4.479.478.607.469	BB	1.497.665.535.748	BB	1.024.318.414.196		1.021.848.760.609		1.021.848.760.609		99,76
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Termasuk : Generasi Emas NTB, Re-Engineering SMK, PAUD HI, Ayo Bercita-Cita, 1000 Cendikia/Beasiswa, STIPark)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	100	1.486.214.496.782	99,95	496.806.046.231	99,95	535.221.521.608		534.411.001.163		18.898.813.613	-	3,53
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	95,28	-	94,38	-	94,38							
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02	-	97,57	-	97,57							

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6	-	70	-	70							
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1	-	1	-	1							
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18	-	1:18	-	1:18							
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10	-	1:12	-	1:12							
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Termasuk : Sekolah Aman Bencana)	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.986.884.736	100	696.067.714	100	116.294.000		114.290.006		108.405.006	-	93,22
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004.195	100	69.288.275.305	100	67.210.384.280		67.209.958.680		51.353.796.947	-	76,41
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	-	99,58	-	99,58							
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100	-	100	-	100							

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100	-	60,00	-	60,00							
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80,00	-	6,00	-	6,00							
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,50	194.889.101	100	65.788.824	100	48.631.600		47.565.267		38.584.824	-	79,34
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA (Termasuk : Rumah Bahasa)	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187	35	309.938.698	35							
				-		-								
KESEHATAN				2.127.698.117.448		712.649.672.182				1.364.395.501.069		492.152.428.482		
Dinas Kesehatan				692.755.042.871		231.585.014.290		-		277.032.615.867		142.311.209.090		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah (Persen)	%	100	193.611.784.126	100	64.723.581.957	100		100	62.628.281.915	100	34.089.415.257	100	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022										
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD				
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Termasuk : Generasi Emas NTB, Jamban Keluarga/Stop BABS, Air Bersih/Air Minum Untuk Semua, SPAM Regional, Wisata Halal&Sehat, Desa Bersinar)	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85,00	490.192.636.948	85,00	163.526.294.113	85,00				210.478.858.671		105.301.105.992		
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97,00	-	97,00	-	97,00			97,00		100		103,09	
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	80,00	-	75,00	-	75,00			100,00					
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100	-	100,00	-	100,00			100		100		100,00	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022												
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD				
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)			
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100	-	90,00	-	90,00			80			100			111,11	
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	97,00	-	97,00									-	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100,00	-	100,00	-	90,00			90,00			100			111,11	
	Persentase balita Wasting	%	10,41	-	11,41	-	11,41			11,41			5,74			50,31	
	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi		1500	-	85	-	85										
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Termasuk: NTB Berolahraga)	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3,00	3.651.104.864	3,00	1.391.035.404	2,50			2,50			3.546.289.365	1,07		2.759.936.967	42,80
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi	%	95,00	239.953.724	90,00	100.000.000	90,00						30.500.000	111,11		-	123,46

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	syarat (Persen)													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Termasuk : Revitalisasi Posyandu)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	100,00	5.059.563.209	100,00	1.844.102.816	70,00		65,00	348.685.915		160.750.873		
				-		-								
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				992.375.029.848		331.637.510.037				936.190.872.759		291.719.123.457		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82,5	829.235.419.245	82,5	277.118.590.656	81		81	416.345.054.479	97,68	72.394.795.578	120,59	#DIV/0!
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90,00	163.139.610.602	85,00	54.518.919.382	85,00		85,00	519.845.818.280	90,81	219.324.327.879	106,84	
				-		-								
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi				203.781.139.545		68.831.512.793				67.003.046.436		26.968.611.075		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	151.624.874.552	BB	50.673.645.695	BB			55.449.356.773		19.071.350.604		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022										
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD		
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.809.896.151	75,00	10.339.417.902	75,00				6.093.689.663		3.614.760.471	-	
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80,00	-	80,00	-	80,00							-	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				22.346.368.842		7.818.449.197					5.460.000.000		4.282.500.000		
				-		-									
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				238.786.905.185		80.595.635.062					84.168.966.008		31.153.484.860		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	44.064.282.039	B	14.872.627.926	B				58.830.297.140		12.145.433.944		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479.341.067	78,00	48.764.835.901	78,00				9.744.668.868		6.677.750.916		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				50.243.282.079		16.958.171.235					15.594.000.000		12.330.300.000		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
				-		-								
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.564.189.303.857	-	587.200.570.747		709.979.816.318	-	726.016.290.499		315.488.786.650		
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.564.189.303.857		587.200.570.747		709.979.816.318		726.016.290.499		315.488.786.650		44,44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100,00	154.693.666.971	100	51.341.724.050	100	54.388.503.136		54.453.298.102		41.252.896.393	-	75,85
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	342.401.082.017	75,37	78.749.039.047	75,37	93.568.301.850		106.251.620.075		69.039.435.512	-	73,79
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000	78,45	3.337.898.000	78,45	1.997.599.789		2.185.892.917		630.556.709	-	31,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	931.804.007.968	85,36	424.968.754.650	85,36	514.270.557.414		509.153.196.079		185.410.601.093	-	36,05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,96	300.000.000	80,90	100.000.000	80,90	216.823.400		216.431.392		209.980.000		96,84
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luas Layanan Drainase	Km2	594,93	37.749.587.000	576,59	8.470.690.000	576,59	9.964.810.229		14.180.174.735		5.403.374.849	-	54,22

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Kawasan	6,00	3.713.279.001	2,00	1.400.000.000	2,00	2.603.022.300		5.873.690.882		2.142.378.582	-	82,30
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Daya Serap Jasa Konstruksi bersertifikat	%	7,00	2.448.827.000	7,00	616.697.000	7,00	339.938.000		338.769.700		140.137.587	-	41,22
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900	89,69	892.236.000	89,69	330.782.000		428.933.550		138.014.584	-	41,72
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengelolaan sampah	%	70,00	200.000.000	60,00	100.000.000	60,00	17.180.307.200		16.012.305.736		4.796.764.400	-	27,92
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Daya tumbuh wilayah strategis	%	31,98	77.636.915.000	29,08	13.984.649.000	29,08	7.384.030.500		7.057.741.802		3.561.604.587	-	48,23
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Daya tumbuh wilayah strategis	%	31,98	5.775.510.000	29,08	3.238.883.000	29,08	7.735.140.500		9.864.235.529		2.763.042.355	-	35,72
				-		-								
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				649.227.264.053		184.742.421.351		163.016.809.083	-	212.821.890.316		92.272.744.288		
Dinas Perumahan dan Permukiman				649.227.264.053		184.742.421.351		163.016.809.083		212.821.890.316		92.272.744.288		56,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	28.728.267.404	100	10.043.450.936	100	8.849.377.969	100	8.837.186.766	100	6.403.893.988	100	72,37

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (Termasuk : Rumah Layak Huni)	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.063.959.946	100	2.526.185.090	100	459.662.300	100	456.227.736		200.299.427	-	43,58
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91	-	98,86	-	98,86							
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%	68,95	26.144.370.835	68,95	9.140.116.320	65,80	2.698.574.564	65,80	3.131.876.564		174.868.965	-	6,48
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	255	587.290.665.869	255	163.032.669.005	85	151.009.194.250	85	200.396.599.250		85.493.681.907	-	56,61
				-		-								
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				103.045.643.848		34.063.097.187		29.176.100.237		29.438.327.194		21.648.624.885		
Satuan Polisi Pamong Praja				66.337.278.672		21.993.642.128		19.518.784.475		19.507.885.882		14.344.928.003		73,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai	BB	54.892.010.634	BB	18.060.738.462	BB	16.568.876.616		16.418.342.281		12.749.764.710		76,95

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Termasuk: Bale Mediasi, Desa Bersinar)	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00	11.445.268.038	100,00	3.932.903.666	100,00	2.949.907.859		3.089.543.601		1.595.163.293	-	54,08
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	-	100,00	-	100,00							
				-		-								
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB				36.708.365.176		12.069.455.059		9.657.315.762		9.930.441.312		7.303.696.882		75,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	22.262.865.781	BB	7.319.875.367	BB	6.760.061.762		6.746.432.459		5.021.316.360		74,28
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445.499.395	32,78	4.749.579.691	32,78	2.897.254.000		3.184.008.853		2.282.380.522	-	78,78
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50	-	67,34	-	67,34							
				-		-								
SOSIAL				240.064.999.144		80.354.999.715	-	56.518.457.055	-	63.976.610.930		36.314.955.938		
Dinas Sosial				240.064.999.144		80.354.999.715		56.518.457.055		63.976.610.930		36.314.955.938		64,25

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	99.836.536.615	BB	33.417.469.851	BB	32.243.701.855	BB	32.046.701.651		24.025.454.184		74,51
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Termasuk : Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	%	100	38.556.948.963	100	12.905.853.140	100	5.813.616.000	100	9.376.781.285	13,00	1.353.696.641	13,00	23,28
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635	100	788.655.091	100	465.862.650	100	455.110.750	45,00	262.781.190	45,00	56,41
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,50	53.397.902.044	3,50	17.873.444.354	3,50	9.834.701.500	3,50	12.754.337.208	0,04	7.437.343.019	1,14	75,62
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Termasuk: Ramah Difabel)	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612	100	12.479.741.066	100	7.152.566.000	100	8.338.080.986	45,00	2.620.302.341	45,00	36,63
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993	100	2.524.923.366	100	819.100.000	100	819.100.000	100,00	563.773.750	100,00	68,83

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	%	100	1.090.197.282	100	364.912.847	100	188.909.050	100	186.499.050	100,00	51.604.814	100,00	27,32
				-		-								
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				854.457.079.481		282.077.536.489		292.292.729.953		300.131.835.041		219.930.985.293		
TENAGA KERJA				79.437.727.175		26.118.219.161		29.758.998.964		29.941.464.154		19.164.459.148		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				79.437.727.175		26.118.219.161		29.758.998.964		29.941.464.154		19.164.459.148		64,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP OPD	Indeks	90	67.772.017.170	87	22.193.454.621	87	25.960.390.784	80	26.176.370.855	77,48	17.278.258.985	89,06	66,56
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300.351.716	85	100.214.713	85	37.264.900	100	36.487.278	100,00	23.346.900	117,65	62,65
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (Termasuk : Revitalisasi BLK)	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18,00	3.481.991.780	17,00	1.232.588.784	17,00	1.395.473.420	17,00	1.391.967.215	13,97	692.499.469	82,18	49,62
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391.251.944	51,09	1.115.004.981	51,09	731.196.200	51,09	708.223.880	12,22	415.985.890	23,92	56,89

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23,00	1.025.630.908	22,00	337.215.751	22,00	887.964.800	22,00	887.964.800	18,00	454.404.500	81,82	51,17
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.656	22	1.139.740.311	22	746.708.860	11	740.450.125	12,34	299.963.404	56,09	40,17
				-		-								
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				41.468.266.554		13.413.235.006	-	9.608.419.558	-	9.653.623.931		7.015.699.921		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				41.468.266.554		13.413.235.006		9.608.419.558		9.653.623.931		7.015.699.921		73,02
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP/LKJIP	Nilai	BB	27.243.987.543	BB	8.721.517.845	BB	8.456.974.467		8.442.797.056		6.374.276.821		75,37
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231.111.760	52,17	2.021.592.521	52,17	500.639.100	52,17	499.247.700	100	249.407.260	191,68	49,82
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat	%	83,07	2.837.249.127	75,52	920.503.730	75,52	120.884.160		170.518.526	0	68.173.558	-	56,40

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	Layanan Komprehensif													
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.340.778.150	5	434.995.741	5	151.850.000		139.745.756		55.648.301	-	36,65
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	200.537.840	1	75.000.000	1	-		-		-		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (Termasuk: Kota Layak Anak)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42,00	1.490.733.752	80,00	512.037.084	80,00	125.300.000		138.640.750	60	115.027.141	75,00	91,80
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA			-		-								
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.123.868.384		727.588.084		252.771.831		262.674.143		153.166.841		60,59
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif			-		-								
				-		-								
PANGAN				43.778.395.668		14.468.336.276		10.988.420.320		10.940.147.156		7.744.629.332		
Dinas Ketahanan Pangan				43.778.395.668		14.468.336.276		10.988.420.320		10.940.147.156		7.744.629.332		70,48

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP DKP NTB	Point	>70-80 (BB)	28.542.381.418	>70-80 (BB)	9.224.753.205	>70-80 (BB)	8.622.321.940		8.588.947.942		6.427.434.341		74,54
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	%	86,62	770.871.786	79,62	300.963.367	79,62		79,62			-		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (Termasuk : KRPL/P2L)	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466.150.864	100	3.778.523.930	100	1.710.143.300	100	1.704.032.117	100,00	755.551.846	100,00	44,18
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.141.837.902	5,77	358.435.000	5,77	465.253.000	4,77	464.275.978	1,78	412.541.478	82,67	88,67
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	1.857.153.698	85,00	679.047.614	85,00	190.702.080	85,00	182.891.119	100,00	149.101.667	117,65	78,19
				-		-								
PERTANAHAN				-		-								
Sekretariat Daerah				-		-								

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
Biro Pemerintahan				-		-								
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Cakupan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%		-		-								
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan konflik pertanahan yang terselesaikan	%		-		-								
				-		-								
LINGKUNGAN HIDUP				276.860.568.083		91.091.932.643		-	98.027.110.120		-	101.039.138.986		92.871.709.619
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				276.860.568.083		91.091.932.643		98.027.110.120		101.039.138.986		92.871.709.619		94,74
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	254.739.544.866	BB	83.704.596.223	BB	80.574.470.587	BB	82.083.948.122	BB	82.083.948.122	100	101,87
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24	1.024.902.303	24,24	337.210.648	100,00	177.488.000	100,00	176.719.188	100	125.397.304	100,00	70,65
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2.835.284.286	10	932.857.745	10	915.682.334		1.032.144.846	0	730.442.638	-	79,77
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	232.926.464	1	100.000.000	1	77.554.200		77.054.700	0	56.177.600	-	72,44

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232.426.464	210	100.000.000	210	11.374.000		11.160.214	0	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha / kegiatan	30	605.251.864	25	199.138.369	100	1.089.208.197	100	1.089.208.197	100	236.111.381	100,00	21,68
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10,00	632.449.873	10,00	208.086.986	10,00	597.673.600		567.186.100	0	93.557.300	-	15,65
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	-	-	-	-	-							
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641.333.479	20	211.009.847	20	34.895.002,00		33.691.854,35	100	27.582.954,00	500,00	79,05

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)	Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	85	5.299.032.825	85	14.548.764.200	85	15.968.025.764	85	9.518.492.320	100,00	65,42
				-		-								
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.584.460.000		1.503.882.000	-	157.117.000	-	193.389.711		81.510.021		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4.584.460.000		1.503.882.000		157.117.000		193.389.711		81.510.021		51,88
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el persatuan penduduk	%	98,90	880.122.000	98,80	290.696.000	98,80	50.429.000	98,80	89.880.529	96,97	27.431.229	98,15	54,40
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654.257.000	100	216.094.000	100	22.444.700	100	21.508.437	100,00	14.001.540	100,00	62,38
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3.050.081.000	100	997.092.000	100	64.764.300	100	63.101.664	100,00	39.077.251	100,00	60,34

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	%	100	105.000.000	100	45.000.000	100	19.479.000	100	18.899.081	100,00	1.000.000	100,00	5,13
				-		-								
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				58.573.193.378		19.346.151.881	-	14.991.382.970	-	15.080.310.549		10.072.051.547		
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				58.573.193.378		19.346.151.881		14.991.382.970		15.080.310.549		10.072.051.547		67,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP	Nilai	A	32.936.598.859	A	10.878.636.024	A	10.188.890.170	A	10.187.668.088	A	7.568.665.316	100,00	74,28
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25,00	266.644.000	20,00	100.000.000	20,00	250.000.000	20,00	246.523.380	6,83	128.613.030	34,15	51,45
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	%	92,00	850.860.057	82,00	281.030.744	82,00	1.166.250.100	82,00	1.220.792.760	60,00	400.519.211	73,17	34,34

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70,00	24.519.090.462	65,00	8.086.485.113	65,00	3.386.242.700	65,00	3.425.326.320	53,44	1.974.253.990	82,22	58,30
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37,00	-	27,00	-	27,00	27,00	27,00	95,04		352,00		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100,00	-	80,00	-	80,00	80,00	80,00	85,13		106,41		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-	56,41	-	56,41	56,41	56,41	65,81		116,66		
				-		-								
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.158.060.034		1.065.119.991	-	265.066.600	-	462.602.819		62.501.003		23,58
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3.158.060.034		1.065.119.991		265.066.600		462.602.819		62.501.003		23,58
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan	Tahun		1.122.043.710		364.030.571		48.199.000		175.501.299		17.142.149		35,57
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Poin	2,44	-	2,54	-	2,54							

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%		1.032.157.764		375.402.281		35.481.800		32.778.906		32.778.854		92,38
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%		-		-								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		%		1.003.858.561		325.687.138		181.385.800		254.322.614		12.580.000		6,94
				-		-								
PERHUBUNGAN				44.894.436.416		14.700.943.703		-		17.123.262.200		12.464.213.033		
Dinas Perhubungan				44.894.436.416		14.700.943.703		16.898.317.774		17.123.262.200		12.464.213.033		73,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	27.968.523.446	BB	9.241.680.803	BB	9.314.962.119	BB	9.479.845.382		6.614.531.463		71,01
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81,63	14.665.159.820	80,40	4.694.778.700	80,40	7.256.264.955	80,40	7.322.641.097		5.553.500.915		76,53
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100,00	-	98,59	-	98,59	-	98,59	-		-		
	Persentase Prasarana	%	40,00	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-		-		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	terminal dalam kondisi baik													
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58	-	49.39	-	49.39		49.39					
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penilaian Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.260.753.150	61.61	764.484.200	61.61	327.090.700	61.61	320.775.721		296.180.655		90,55
				-		-								
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				58.423.124.020		19.304.545.746		-	18.601.226.435		-	19.120.715.890		11.989.616.906
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				58.423.124.020		19.304.545.746		18.601.226.435		19.120.715.890		11.989.616.906		64,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LKjIP (SAKIP) OPD	Nilai	A	35.246.710.913	BB	11.646.445.729	BB	10.417.410.085	BB	10.563.312.721		7.677.389.833		73,70
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Termasuk: NTB Care, Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana/SI-AGA, NTB Terkoneksi)	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80,00	16.947.033.421	70,00	5.599.748.172	70,00	7.337.616.350	70,00	7.634.088.165	70	4.025.318.074	100,00	54,86

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Termasuk: SPBE, Kampung Digital, eNTeBe Plan/SIPD)	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65,00	6.229.379.686	55,00	2.058.351.845	55,00	846.200.000	55,00	923.315.005	55	286.909.000	100,00	33,91
				-		-								
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				65.117.157.771		21.636.082.935	-	20.612.882.466	-	20.778.259.487		11.368.541.247		
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				65.117.157.771		21.636.082.935		20.612.882.466		20.778.259.487		11.368.541.247		55,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	42.182.004.779	BB	13.988.922.209	BB	12.209.276.746	BB	12.195.137.979		8.768.782.985		71,82
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	40,00	877.789.534	35,00	318.294.395	35,00	323.632.620	35,00	323.632.620		62.720.000	-	19,38
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi Yang Menerapkan Pola Syariah	Persentase Kesehatan Koperasi/Koperasi yang Berku alitas	35,00	3.941.945.666	35,00	1.309.766.370	35,00	1.569.589.200	35,00	1.719.589.200		350.130.800	-	22,31
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kapasitas SDM Koperasi Yang Ditingkatkan	%	1200	3.464.760.379	400	1.151.214.910	400	755.238.200	400	754.260.579		652.594.500	-	86,41

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Akuntabel	%	67,26	1.877.116.984	22,42	623.698.271	22,42	881.214.100	22,42	1.190.185.130		410.121.010	-	46,54
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) (Termasuk : UMKM Bersaing, Rumah Kemas)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.806.536.363	6,35	1.597.038.675	6,35	2.409.280.000	6,35	2.131.780.000		66.336.660	-	2,75
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967.004.066	53,53	2.647.148.104	53,53	2.464.651.600	53,53	2.463.673.979		1.057.855.292	-	42,92
				-		-								
PENANAMAN MODAL				34.590.097.123		11.601.520.368	-	9.621.587.094	-	9.773.647.850		7.010.139.616		
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				34.590.097.123		11.601.520.368		9.621.587.094		9.773.647.850		7.010.139.616		72,86
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	A (83-85)	25.777.295.727	A (80-82)	8.470.741.798	A (80-82)	8.381.671.294	A (80-82)	8.475.785.146		6.207.577.184		74,06
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL (Termasuk : Ramah Investasi/Online Service)	Perentase Peningkatan Minat Investasi	%	60,00	1.099.303.769	5,00	596.026.769	5,00	340.827.800	5,00	398.774.705		184.012.997	-	53,99

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL (Termasuk : Kawasan Samota)	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	100,00	2.628.846.723	100,00	863.871.915	100,00	202.880.000	100,00	202.880.000		202.668.900	-	99,90
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL (Termasuk : Mall Investasi & Pelayanan Publik)	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%	93,00	1.953.548.364	90,00	641.960.427	90,00	20.000.000	90,00	20.000.000		19.736.500	-	98,68
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Termasuk: KEK Mandalika)	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	%	60,00	2.702.918.671	55,00	888.212.883	55,00	676.208.000	55,00	676.208.000		396.144.036	-	58,58
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	%	100,00	428.183.869	100,00	140.706.575	100,00	-	100,00	-		-	-	
				-		-								
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				71.473.822.339		23.661.504.506	-	28.074.632.413	-	31.116.880.094	-	19.220.560.020		68,46
Dinas Pemuda dan Olahraga				71.473.822.339		23.661.504.506		28.074.632.413		31.116.880.094		19.220.560.020		68,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip DISPORA	Nilai	A (>80-90)	28.688.902.994	BB (>70-80)	9.510.806.416	BB (>70-80)	8.167.127.863	BB (>70-80)	8.153.597.505		6.027.897.269		73,81
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332	100	3.711.881.596	100	2.954.270.110	100	4.508.360.267	100	817.289.538	100,00	27,66

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	-	100	-	100		100			100		100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31.488.202.013	100	10.438.816.493	100	16.953.234.440	100	18.454.922.322	100	12.375.373.213	100,00	73,00
				-		-								
STATISTIK				1.530.744.809		505.798.581	-	121.940.300	-	119.193.050		79.083.475		
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1.530.744.809		505.798.581		121.940.300		119.193.050		79.083.475		64,85
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Termasuk: NTB Satu Data)	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30,00	1.530.744.809	25,00	505.798.581	25,00	121.940.300	25,00	119.193.050	30	79.083.475	120,00	64,85
				-		-								
PERSANDIAN				1.492.430.577		493.138.545	-	167.695.000	-	166.715.980		150.733.295		
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				1.492.430.577		493.138.545		167.695.000		166.715.980		150.733.295		89,89
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50,00	1.492.430.577	40,00	493.138.545	40,00	167.695.000	40,00	166.715.980	40	150.733.295	100,00	89,89
				-		-								

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
KEBUDAYAAN				15.346.021.404		5.257.600.439	-	4.281.601.600	-	4.447.627.359		2.093.884.328		
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				15.346.021.404		5.257.600.439		4.281.601.600		4.447.627.359	-	2.093.884.328		48,90
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (Termasuk : NTB Juara)	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759	72,73	2.173.198.075	72,73	2.382.930.000		2.632.930.000		1.107.969.650	-	46,50
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736	100	508.873.145	100	107.435.800		107.236.000		91.221.600	-	84,91
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	272.477.237	100	105.697.700		105.188.210		71.587.493	-	67,73
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				2.087.837.054		729.816.305		149.999.800		69.645.755		-		-
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	%	28,57	4.706.027.313	42,86	1.573.235.678	42,86	1.535.538.300		1.532.627.394		823.105.585	-	53,60
				-		-								
PERPUSTAKAAN				52.556.280.321		17.504.419.949	-	29.981.143.339	-	30.046.401.785		18.420.616.747		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				52.556.280.321		17.504.419.949		29.981.143.339		30.046.401.785		18.420.616.747		61,44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	100	48.526.217.647	100	16.161.065.724	100	13.998.112.489	100	13.996.845.492	50	10.320.575.817	50,00	73,73

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (Termasuk : Literasi Digital, Ayo Bercita - Cita)	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.405.712.853	100	1.135.237.618	100	15.919.223.850	100	15.993.518.516	50	8.066.717.084	50,00	50,67
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624.349.821	100	208.116.607	100	63.807.000	100	56.037.777	75	33.323.846	75,00	52,23
				-		-								
KEARSIPAN				1.172.293.809		405.104.761	-	135.188.000	-	128.454.041		121.036.034		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				1.172.293.809		405.104.761		135.188.000		128.454.041		121.036.034		89,53
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	%	100	981.309.629	100	327.103.210	100	125.778.600	100	120.489.195	50	118.921.584	50,00	94,55
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	%	100	190.984.180	100	78.001.551	100	9.409.400	100	7.964.846		2.114.450	-	22,47
				-		-								
URUSAN PILIHAN				1.300.685.641.711		427.237.932.624		429.675.602.851	-	404.146.123.812		220.650.815.389		
KELAUTAN DAN PERIKANAN				147.403.841.479		48.301.423.578	-	54.921.046.639	-	53.536.696.017		36.276.582.114		
Dinas Kelautan dan Perikanan				147.403.841.479		48.301.423.578		54.921.046.639		53.536.696.017		36.276.582.114		66,05

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	Nilai	A	82.454.924.806	A	27.572.605.531	A	25.261.056.495	A	25.349.604.739	A	19.589.439.548	100,00	77,55
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (Termasuk : Industri Perikanan : Garam, Tepung Ikan, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau Kecil)	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	15.330.163.046	8,74	4.909.615.839	8,74	6.600.444.500	8,74	5.815.434.715	4	3.565.095.739	48,63	54,01
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	24.939.491.743	249.099	8.708.211.521	249.099	11.879.637.504	249.099	11.328.462.048		5.612.386.476	-	47,24
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk : Budidaya Lobster, KRPL/P2L)	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	12.839.475.578	1.219.005	3.795.727.604	1.219.005	7.949.716.100	1.219.005	7.884.620.200	718.740	5.670.628.210	58,96	71,33
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	8.942.779.585	99,92	1.962.524.606	99,92	3.124.980.000	99,92	3.120.004.980	67,50	1.820.435.096	67,55	58,25
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215.700	2.897.006.721	214.373	1.352.738.477	214.373	105.212.040	214.373	38.569.335	75.484	18.597.045	35,21	17,68
				-		-								
PARIWISATA				71.557.010.471		23.685.670.157	-	18.908.639.955	-	19.557.538.848		13.117.345.116		
Dinas Pariwisata				71.557.010.471		23.685.670.157		18.908.639.955		19.557.538.848		13.117.345.116		69,37

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	43.472.230.668	BB	14.365.246.064	BB	13.510.299.727	BB	13.689.139.449		10.648.567.876		78,82
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA (Termasuk : Penataan 3 Gili KLU&Pulau-pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani&Tambora, Revitalisasi Islamic Centre)	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580.012.830	85,85	5.503.206.408	85,85	3.108.149.928	85,85	2.244.665.514	67,68	733.624.993	78,84	23,60
	Persentase Geosite yang tertata	%	50,00	-	50,00	-	50,00	50,00						
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA (Termasuk: Wisata Halal&Sehat)	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.391.905.747		2.446.751.761		2.055.655.300		3.217.416.475		1.532.186.761		74,54
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		606.633.173		209.889.754	35,21	203.735.000	35,21	343.285.450	30,97	202.965.486	87,96	99,62

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota)	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506.228.054		1.160.576.170	70,00	30.800.000	70,00	63.031.960		-		-
				-		-								
PERTANIAN				696.223.692.820		226.861.287.951	-	238.318.381.985	-	213.340.029.005		111.477.735.135		
Dinas Pertanian dan Perkebunan				493.666.101.192		159.868.179.338		181.346.254.814		161.827.577.642		79.905.083.799		44,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Lakip OPD	Nilai	80,18	141.976.583.682	78	52.770.901.729	78	44.174.183.070		44.334.065.600		33.990.851.744	-	76,95
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern, Industri Peternakan/Pakan Ternak)	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319	1,99	19.956.291.589	1,99	23.797.698.356		25.461.473.639		7.764.586.313	-	32,63
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Termasuk: Industri Pangan dan Holtikultura, Industri Perkebunan, Irigasi Cukup)	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055	65,56	79.975.449.202	65,56	107.937.884.588		86.694.646.441		34.713.383.410	-	32,16

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/paket	10	-	2	-	2							
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,50	1.229.042.136	96,00	434.192.818	96,00	42.385.000		42.085.300		42.085.300	-	99,29
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN (Termasuk: KRPL/P2L, NTB Hijau)	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100,00	18.894.573.000	70,00	6.731.344.000	70,00	5.394.103.800		5.295.306.662		3.394.177.032	-	62,92
				-		-								
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				202.557.591.628		66.993.108.613		56.972.127.171		51.512.451.363		31.572.651.336		55,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP OPD	NILAI	A	55.690.397.007	BB+	18.406.922.954	BB+	19.856.559.872	BB+	19.872.576.478		14.825.223.028		74,66
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (Termasuk : Industri Peternakan/Pakan Ternak, Pertanian Lestari/Modern, KRPL/P2L)	Pertumbuhan Populasi Ternak (Persen)	%	10	135.417.101.158	9,5	44.798.298.458	9,5	34.971.844.572	9,5	29.743.328.588	3,7	15.942.724.413	38,95	45,59
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (Termasuk :	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan (Persen)	%	100	1.707.732.485	100	564.947.181	100	76.081.000	100	75.301.780	100	3.959.500	100,00	5,20

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
Kampung Unggas)														
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS (Persen)	%	< 1	8.463.555.546	< 1	2.799.889.261	< 1	1.809.917.627	< 1	1.584.462.062		681.659.480		37,66
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi (%)	%	100	1.278.805.431	100	423.050.759	100	257.724.100	100	236.782.455	50	119.084.915	50,00	46,21
				-		-								
KEHUTANAN				80.975.856.493		26.642.462.365		-	61.378.523.039		-	27.170.759.158		
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				80.975.856.493		26.642.462.365		61.378.523.039		61.440.376.622		27.170.759.158		44,27
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.710.986.449	83,38	20.303.985.721	83,38	45.090.624.289	41	45.145.699.017	100	16.153.200.098	119,93	35,82
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10		10		9		89,40	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843.299.456	30.503	935.494.875	30.503	217.758.300	30503,3	215.562.498	30503,3	134.217.498	100,00	61,64
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125.242.316	17,70	699.241.612	17,70	815.246.500	-	819.625.522	-	738.223.989	-	90,55
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4	14.296.328.273	4	4.703.740.157	4	15.254.893.950	-	15.259.489.585	-	10.145.117.573	-	66,50
				-		-								
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				47.140.228.066		15.225.808.355	-	10.289.860.859	-	10.260.661.891		7.576.658.586		73,63
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				47.140.228.066		15.225.808.355		10.289.860.859		10.260.661.891		7.576.658.586		73,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	36.290.722.783	BB	11.707.541.144	79	9.704.987.320	79	9.648.546.684	80,38	7.173.141.399	101,75	73,91
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN (Termasuk : Geopark - Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona	5	2.183.969.829	2	710.995.251	2	129.099.200		136.250.855	0,0	71.319.144	-	55,24

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA (Termasuk: Industri Pertambangan/Smelter&Industri Turunannya)	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%	10,87	1.127.744.131	8,70	372.642.965	8,70	101.257.300		91.621.346	0,0	54.278.506	-	53,60
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.991.688.898	5,64	643.295.009	5,64	106.634.104	5,64	97.282.065	13,04	63.696.227	231,21	59,73
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN (Termasuk: Nusa Tenggara Banderang)	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,99	5.546.102.425	99,88	1.791.333.986	99,88	247.882.935	100,00	286.960.940	100	214.223.309	100,10	86,42
				-		-								
PERDAGANGAN				82.220.708.558		26.136.286.323		21.813.786.819		22.564.656.652		12.591.850.023		57,72
Dinas Perdagangan				82.220.708.558		26.136.286.323		21.813.786.819		22.564.656.652		12.591.850.023		57,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	25.797.938.995	BB	8.546.661.034	BB	9.836.640.369	BB	9.868.453.274	A	6.659.429.951	110,00	67,70
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874.409.856	70	289.831.387	70	326.118.500	70	320.260.164	50,00	115.265.239	71,43	35,34

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.833.875.000	100	490.000.000	100	5.231.195.650	100	5.733.190.346	50,00	2.922.799.850	50,00	55,87
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179.316.326	4	1.716.733.208	4	299.496.600	4	296.427.073	4,99	69.600.000	124,75	23,24
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.070.555.572	5	1.349.224.006	5	813.114.800	5	777.146.802	18,00	314.180.900	360,00	38,64
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Termasuk: Rumah Kemasan)	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3.914.544.303	85	1.297.512.601	85	2.263.843.900	85	2.258.888.261	85,00	1.861.218.791	100,00	82,21
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550.068.505	100	12.446.324.087	100	3.043.377.000	100	3.310.290.732	30,00	649.355.292	30,00	21,34
				-		-								
PERINDUSTRIAN				174.480.572.129		60.160.190.710	-	23.969.786.235	-	23.374.571.889		12.397.095.548		
Dinas Perindustrian				174.480.572.129		60.160.190.710		23.969.786.235		23.374.571.889		12.397.095.548		51,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%	100	67.096.997.521	100	23.134.771.497	100	12.963.191.835	100	12.989.467.682		8.855.388.209	-	68,31

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Termasuk : Industri Motor Listrik, Industri Peralatan & Permesinan, Industri Pertambangan (Smelter) & Industri Turunannya, Rumah Kemasan, Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat, STIPark, Re-Engineering SMK, Industri Perkebunan, Industri Pangan & Holtikultura, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK, Industri Peternakan/Pakan Ternak, UMKM Bersaing, Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223	100	35.280.281.729	100	9.557.317.900	100	8.783.093.439	20	2.936.264.170	20,00	30,72
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.892	3,14	1.040.710.958	3,14	985.393.500	3,14	1.109.169.725	20	429.191.625	636,94	43,56
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1,00	2.043.024.494	1,00	704.426.525	1,00	463.883.000	1,00	492.841.043	37,99	176.251.544	3.799	37,99

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
				-		-								
TRANSMIGRASI				683.731.694		224.803.187	-	75.577.320	-	71.592.888		42.789.710		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				683.731.694		224.803.187		75.577.320		71.592.888		42.789.710		56,62
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan baru transmigrasi	%	100	316.250.750	100	103.979.641	100	29.765.920	100	27.514.953	100	26.671.256	100,00	89,60
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%	75	367.480.944	75	120.823.545	75	19.631.500	75	18.678.454	0	16.118.454	-	82,11
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%	100	-	100	-	100	26.179.900	100	25.399.481	100	-	100,00	-
				-		-								
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				1.235.902.512.248		412.862.248.863		108.535.331.741	-	332.189.772.239		195.452.148.138		
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1.235.902.512.248		412.862.248.863	-	108.535.331.741	-	332.189.772.239		195.452.148.138		
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-		412.862.248.863	-	108.535.331.741	-	332.189.772.239		195.452.148.138		
Sekretariat Daerah				901.184.641.957		300.728.213.986		0		203.479.374.890		112.407.618.964		
Biro Umum				534.272.050.811		178.288.302.022				113.078.088.870		77.505.480.318		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022										
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD		
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai	B	534.272.050.811	B	178.288.302.022	B				113.078.088.870		77.505.480.318		
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	%	100	-	100	-	100								-
				-		-									
Biro Organisasi				6.271.825.795		2.092.928.443					1.965.270.281		1.336.202.813		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai	A	2.429.432.238	BB	810.709.353	BB		BB		412.445.978	BB	320.413.325		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI (Termasuk : SAKIP Level A)	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842.393.557		1.282.219.090					1.552.824.303		1.015.789.489		
Biro Hukum				7.108.770.559		2.372.219.603					1.194.683.124		860.235.074		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	-	B	-	B								
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	-	100	-	100								-
	Persentase Produk Hukum Daerah	%	100	-	100	-	100								-

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	Kab./Kota yang Terfasilitasi													
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100	-	100	-	100						-	
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100	-	100	-	100						-	
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100	-	100	-	100						-	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100	-	100	-	100						-	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100	-	100	-	100						-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai		1.381.173.789		460.902.136				526.812.319		361.633.646		
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM (Termasuk: Bale Mediasi)	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.727.596.770	100	1.911.317.467	100		100	667.870.805	100	498.601.428	100,00	
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota	%	100	-	100	-	100		100				-	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	yang Terasilitasi													
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100	-	100	-	100	-	100	-			-	
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100	-	100	-	100	-	100	-			-	
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100	-	100	-	100	-	100	-			-	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100	-	100	-	100	-	100	-			-	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100	-	100	-	100	-	100	-			-	
				-		-		-		-				
Biro Pemerintahan				11.087.787.734		3.700.030.434				1.006.526.182		871.835.754		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai	A	1.602.742.229	A	534.840.238	A		A	435.818.504		344.203.979		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			Target	pagu (Rp)	RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
					Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (Termasuk: Tata Ruang Berkelanjutan, BUMDes Maju/Mahadesa, Mall Investasi&Pelayanan Publik, Ramah Investasi/Online Service)	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.045.504	100	3.165.190.197	100		100	570.707.678	100	527.631.775	100,00	
Biro Perekonomian				8.381.672.268		2.796.990.998				2.451.544.985		1.229.288.008		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai	B	737.562.748	B	246.127.062	B		100	392.881.024	54,2	229.076.557	54,20	58,31
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Termasuk : Mawar Emas, Mall Investasi&Pelayanan Publik)	Prosentase bahan kebijakan perekonomian Daerah	%	100	7.644.109.519	100	2.550.863.936	100		100	2.058.663.961		1.000.211.451		
				-		-								
Biro Administrasi Pembangunan				6.161.445.593		2.056.094.215				689.674.933		442.947.763		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	-	B	-	B							

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022										
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD				
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai		845.950.644		282.296.451					241.519.418		148.675.213		
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	%	40	5.315.494.948	35	1.773.797.763	35				448.155.514		294.272.550		
Biro Pengadaan Barang dan Jasa				15.430.456.395		5.149.192.936					3.083.300.411		1.879.932.790		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai		729.062.977	BB	243.290.661	BB				330.804.900		222.186.028		
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa		Level 4	14.701.393.417	Level 4	4.905.902.275	Level 3				2.752.495.511	Level 3	1.657.746.762	100	
Biro Kesejahteraan Rakyat				295.833.323.406		98.720.531.668					71.510.293.992		23.668.044.431		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	Nilai	A	3.190.249.608	BB	1.064.596.557	BB				462.806.165		394.955.531		
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (Termasuk : 1000 Cendikia/Beasiswa, Rumah Bahasa, Revitalisasi Islamic Center)	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	97.655.935.112	100				71.047.487.827	56,62	23.273.088.900	56,62	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
Biro Humas dan Protokol/Biro Administrasi Pimpinan				-		-								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	-	A	-	A							
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	%	97	-	94	-	94							
				-		-								
Biro Administrasi Kerjasama				-		-								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai		-	BB	-	BB							
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Daerah	%	100	-	100	-	100							
Biro Administasi Pimpinan				16.637.309.397		5.551.923.665				8.499.992.112		4.613.652.013		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				16.637.309.397		5.551.923.665				8.499.992.112	72,28	4.613.652.013		
				-		-								
Dewan Perwakilan rakyat Daerah				334.717.870.291		112.134.034.877		108.535.331.741	-	128.710.397.349		83.044.529.174		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				334.717.870.291		112.134.034.877		108.535.331.741		128.710.397.349		83.044.529.174		76,51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	189.609.638.694	BB	63.521.239.006	BB	68.033.255.765	BB	70.274.122.508	BB	47.380.912.204	100,00	69,64
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	145.108.231.597	100	48.612.795.871	100	40.502.075.976	100	58.436.274.841	100	35.663.616.969	100,00	88,05
				-		-								
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3.059.692.806.225		1.000.689.922.243		1.195.770.466.423		1.214.371.641.918		717.266.310.989		
PERENCANAAN				120.210.731.303	-	39.779.904.930	-	39.770.033.521	-	40.095.094.646		25.118.900.231		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				120.210.731.303		39.779.904.930		39.770.033.521		40.095.094.646		25.118.900.231		63,16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Termasuk : NTB WTP)	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRAS I DAN TEKNIS PERANGKAT DAERAH	%	100	67.933.307.258	100	22.480.359.906	100	28.983.440.821	100	28.937.498.353		18.691.853.580	-	64,49
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Termasuk : eNTEBe Plan/SIPD, SAKIP Level A)	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444.339.884	100	4.779.893.285	100	1.990.962.500	100	1.988.664.800	79	1.515.451.562	79,00	76,12

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Termasuk : NTB SDG's Center, Generasi Emas NTB, Tata Ruang Berkelanjutan, Melawan daru Desa/Penanggulangan Kemiskinan, KEK Mandalika, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani&Tambora, Kawasan Samota, Industri Pertambangan/Smelter dan Industri Turunannya)	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833.084.161	100	12.519.651.738	100	8.795.630.200	100	9.168.931.493	50	4.911.595.089	50,00	55,84
				-		-								
KEUANGAN				2.694.786.159.940		878.279.553.128		1.065.127.513.657		1.082.132.870.687		637.537.046.320		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku SKPD				2.368.323.559.940		769.680.103.128		955.503.809.911		971.231.075.395		559.750.456.684		58,58
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	A	83.473.074.115	A	27.149.250.939	A	39.659.385.067	A	39.079.617.682	0,0	25.581.515.637		64,50
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungja	%	100	2.275.817.467.799	100	739.588.857.260	100	913.713.803.444	100	929.675.006.173	33,50	532.713.555.539	33,50	58,30

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
	waban pelaksanaan APBD Provinsi													
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjaban waban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	3.344.447.192	100	1.092.593.901	100		100					
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Termasuk : NTB WTP)	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.688.570.834	70	1.849.401.028	70	2.130.621.400	70	2.476.451.540	39,93	1.455.385.508	57,04	68,31
				-		-								
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				326.462.600.000		108.599.450.000		109.623.703.746		110.901.795.292		77.786.589.636		70,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	278.611.060.000	A	92.681.390.000	A	98.034.501.246	A	99.013.235.818		70.485.196.395		71,90
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000	36,76	554.780.000	36,76	548.873.200	36,76	445.756.828	33,50	270.596.636	91,13	49,30

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.183.810.000	52,03	15.363.280.000	52,03	11.040.329.300	52,03	11.442.802.646	39,93	7.030.796.605	76,74	63,68
				-		-								
KEPEGAWAIAN				97.394.150.000		34.161.500.000		14.228.964.204		-		10.269.652.975		
Badan Kepegawaian Daerah				97.394.150.000		34.161.500.000		14.228.964.204		14.274.846.491		10.269.652.975		72,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	A	75.879.150.000	BB	27.011.500.000	BB	12.469.698.304	BB	12.517.828.941	85	9.457.595.145		75,84
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH (Termasuk : Agen Perubahan, Manajemen Talenta, SAKIP Level A)	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21.515.000.000	16	7.150.000.000	16	1.759.265.900	16	1.757.017.550	287	812.057.830	1.793,75	46,16
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80	-	80	0	80		80				-	
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		135	-	88	0	88		88				-	
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		136	-	132	0	132		132				-	

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022										
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD		
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19	-	16	0	16		16					-	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				100.320.001.442	-	32.940.000.481	-	21.765.776.376	-	22.106.229.291	-	15.071.828.430			69,25
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				100.320.001.442		32.940.000.481		21.765.776.376		22.106.229.291		15.071.828.430			69,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	%	100	48.664.761.402	100	15.979.039.483	100	16.951.478.914	100	17.323.013.841	70	12.854.002.532	70,00	75,83	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Termasuk : Manajemen Talenta, Agen Perubahan)	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.040	0,09	16.960.960.998	0,09	4.814.297.462	0,09	4.783.215.450	0,10	2.217.825.898	106,88	46,07	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04	-	0,04	-	0,04		0,04				-		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15	-	0,14	-	0,14		0,14				-		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62	-	0,59	-	0,59		0,59				-		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				12.927.191.255		4.277.841.367	-	43.945.480.955	-	44.408.001.264		21.137.206.333			48,10
Badan Riset dan Inovasi Daerah				12.927.191.255		4.277.841.367		43.945.480.955		44.408.001.264		21.137.206.333			48,10

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
			RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD			
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			A		A		BB	8.277.697.055	BB	8.430.108.766	BB	5.089.480.586	100,00	61,48
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (Termasuk : Research Based Policy, NTB Satu Peta, NTB Satu Data)	PERSENTASE KAJIAN KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	%	100	12.927.191.255	65,22	4.277.841.367	65,22	35.667.783.900		35.977.892.498	51	16.047.725.747	78,20	44,99
PENGHUBUNG				34.054.572.285		11.251.122.338	-	10.932.697.710	-	11.354.599.539		8.131.676.699		
Badan Penghubung Daerah				34.054.572.285		11.251.122.338		10.932.697.710		11.354.599.539		8.131.676.699		74,38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (Termasuk: Ramah Investasi/Online Service)	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	34.054.572.285	B	11.251.122.338	B	10.064.187.710	B	10.236.858.769		7.610.337.979		75,62
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000	-	41.000	0	41.000	868.510.000	41.000	1.117.740.770	3.711	521.338.720	9,05	60,03
				-		-								
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				80.744.378.648		27.180.960.031	-	22.392.573.659	-	22.412.044.546		15.894.276.138		
PENGAWASAN				80.744.378.648		27.180.960.031	-	22.392.573.659	-	22.412.044.546		15.894.276.138		
Inspektorat				80.744.378.648		27.180.960.031		22.392.573.659		22.412.044.546		15.894.276.138		70,98

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Inspektorat	Kategori	AA	57.069.234.283	A	19.211.202.093	A	19.844.774.359	A	19.719.424.837	BB	13.699.586.760		69,03
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN (Termasuk : NTB WTP)	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807.331.659	85	1.281.660.820	85	1.709.319.300	85	1.782.707.119	0	1.380.473.061	-	80,76
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89	7.477.942.640	44,44	2.517.297.403	44,44		44,44		0		-	
	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.916.865.961	91,11	981.904.708	91,11		91,11				-	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI (Termasuk: SAKIP Level A)	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402.134.356	6,55	472.000.744	6,55	838.480.000	6,55	909.912.590		814.216.317	-	97,11
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	5.541.790.926	96	1.865.531.280	96		96		79		82,29	
	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529.078.823	22,22	851.362.983	22,22		22,22					
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				82.695.741.730		18.152.064.681	-	18.702.605.399	-	21.416.456.769	-	12.077.049.534		

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				82.695.741.730		18.152.064.681	-	18.702.605.399	-	21.416.456.769		12.077.049.534		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				82.695.741.730		18.152.064.681		18.702.605.399		21.416.456.769		12.077.049.534		64,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	22.467.756.087	A	7.456.451.797	A	6.686.365.799	A	6.754.665.514		5.139.284.450		76,86
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Termasuk : Sekolah Perjumpaan)	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10,00	1.526.591.849	10,00	506.635.309	10,00	166.196.000	10,00	175.432.464		163.438.264	-	98,34
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528.305.431	90,00	5.153.432.345	90,00	4.112.758.200	90,00	4.021.214.745		3.849.317.575	-	93,59
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Termasuk : Desa Bersinar)	Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631.097.489	81,35	541.317.956	81,35	551.620.000	81,35	725.261.360		330.237.360	-	59,87

Bid. Urusan Pemerintahan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode RPJMD		TAHUN 2022									
					RPJMD		RKPD		APBD		Realisasi		Tingkat Capaian Thd RKPD	
			Target	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Target Kinerja	pagu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)	Kinerja	Keu (Rp)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.436.780.947	68,96	808.702.907	68,96	274.075.000	68,96	283.120.955		252.019.955	-	91,95
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Termasuk : Kampung Madani&Sehat, Bale Mediasi)	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927	10,53	3.685.524.366	10,53	6.911.590.400	10,53	9.456.761.730		2.342.751.930	-	33,90

4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2022

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08
				Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	62.74
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68.22
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.56
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70	
			Neraca pengelolaan sampah			%	85.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00
	Persentase Pengurangan Sampah	%		25.00			
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui pengurangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74.68
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91
					Rasio Elektrifikasi	%	99.88
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129.78
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri	Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173.02
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72
			Partisipasi politik masyarakat			%	84.57
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61.16
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27
				Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80	

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022, 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja berdasarkan tabel diatas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur pada tahun 2022. Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2022

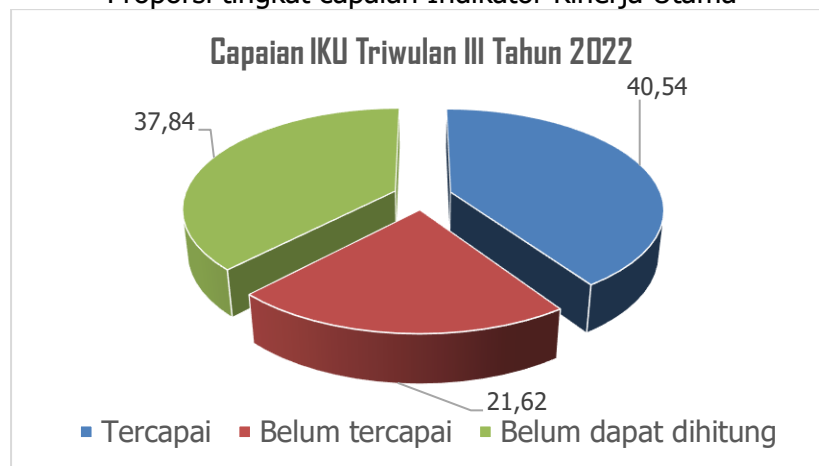
No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	NA	0,00	0.65	BPBD, Dinsos
2	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	NA	0,00	86.6	Dinas PUPR
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	NA	0,00	54.50	Dinas PUPR
4	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	88,57	101,97	89.14	Dishub
5	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00	WTP	BPKAD
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	44,97	121,64	38.65	Bappenda
7	Nilai SAKIP		BB (76,01 - 80,00)	NA	0,00	A (80,01 - 90,00)	Biro Organisasi, Inspektorat, Bappeda
8	Indeks Profesionalisme ASN		0.70	NA	0,00	0.72	BKD, BPSDM
9	Indeks Pelayanan Publik		4.53	NA	0,00	4.55	Biro Organisasi, DMPTSP, Bappeda, Diskominfo, Rumah Sakit
10	Angka Harapan Hidup		67.08	NA	0,00	67.48	Dinkes, Rumah Sakit
11	Persentase Balita Stunting	%	30.99	16,69	146,14	30.49	Dinkes
12	Harapan Lama Sekolah		13.73	NA	0,00	13.79	Dinas Dikbud
13	Rata rata Lama Sekolah		7.04	NA	0,00	7.07	Dinas Dikbud
14	Indeks Kualitas Air		42.93	44,20	102,96	43.03	Dinas LHK
15	Indeks Kualitas Udara		87.56	89,07	101,72	87.59	Dinas LHK
16	Indeks Kualitas Air Laut		70.89	89,48	102,11	71.48	Dinas LHK
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		68.70	65,60	59,32	69.70	Dinas LHK
18	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00	39,68	66,13	70.00	Dinas LHK
19	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00	10,74	42,96	30.00	Dinas LHK
20	Nilai Realisasi Investasi		15,428	14.341	92,95	17,814	DPMPSTSP
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71	26,43	111,47	23.88	Distambun, Disnakeswan, Dislutkan, Dinas LHK
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100.00	100,00	100,00	100.00	Dinkes, Dinsos
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		86.70	93,30	107,61	87.20	DKP
24	Cakupan Air Minum	%	78.45	NA	0,00	80.59	Dinas PUPR
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi	%	80.91	81,59	100,84	82.46	Dinas PUPR, Dinkes, Dinas

No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
	layak						Perkim
26	Rasio Elektrifikasi	%	99.88	99,98	100,10	99.99	Dinas ESDM
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80	NA	0,00	68.95	Dinas Perkim
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	5,88	-147,00	3,0 - 4,0	Disdag, Biro Perekonomian
29	Pengeluaran per kapita		11,603.52	NA	0,00	11,943.70	Disdag
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi & Makan Minum)		129.78	97,74	75,31	137.24	Dispar
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan		173.02	97,74	56,49	179.91	Disperin
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	2,89	109,40	3.17	Disnakertrans
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00	NA	0,00	0.00	Bakesbangpol
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72	55,00	961,54	6.07	Satpolpp
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90	NA	0,00	1.00	Bakesbangpol
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27	27,13	140,79	20.47	DP3AP2KB
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	70,00	87,50	100.00	DP3AP2KB

Sumber: Kemen-LHK, KemenPAN RB, BPS dan Perangkat Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2022, diketahui bahwa sebanyak 15 indikator atau 40,54 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 8 indikator atau 21,62 persen belum mencapai target, Sisanya sebanyak 14 indikator atau 37,84 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase Balita Stunting, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan Kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

Grafik. 3. 1.
Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama



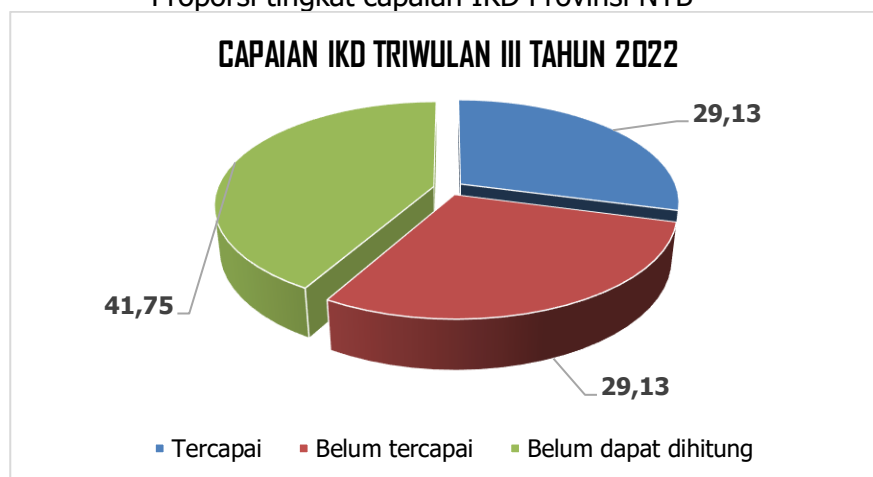
Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 30 indikator atau 29,13 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 30 indikator yang lain atau 29,13 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 43 indikator atau 41,75 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Grafik. 3. 2.
Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



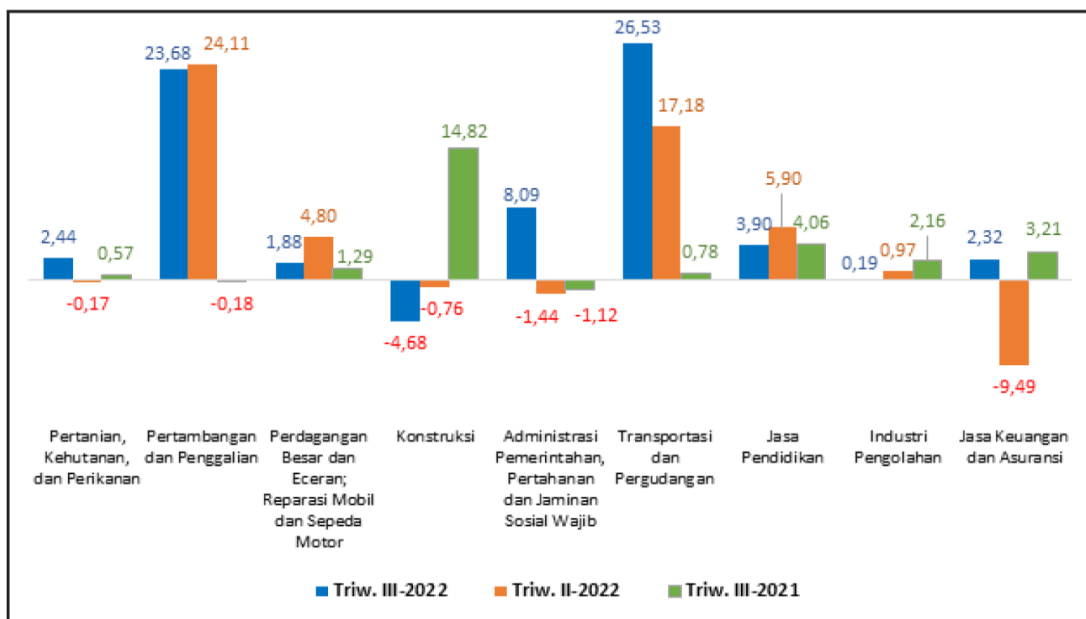
Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

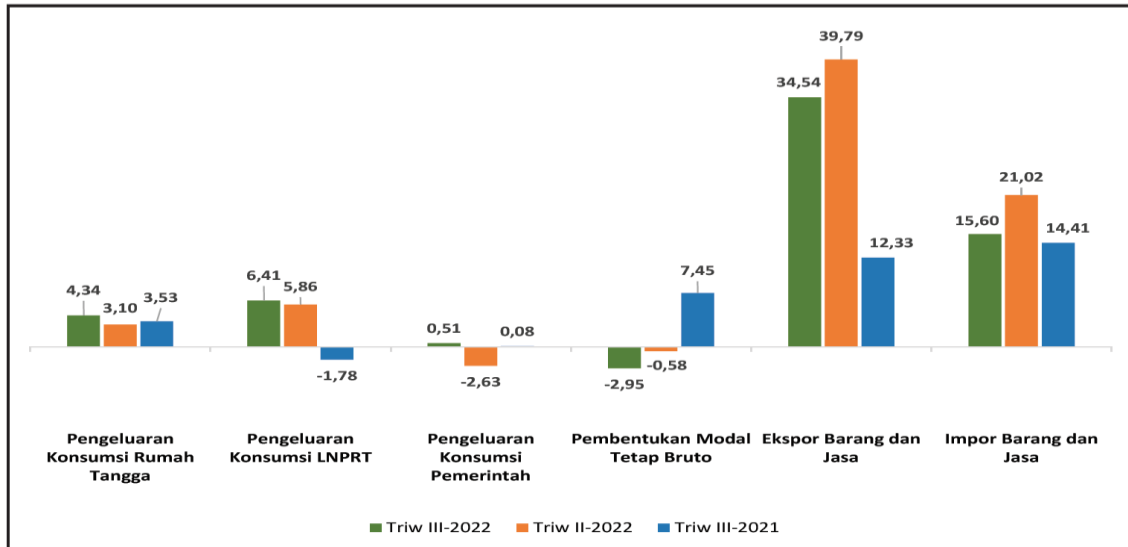
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam

Pertumbuhan Ekonomi NTB pada Triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, bila dibandingkan dengan Triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,10 persen (termasuk pertambangan bijih logam). Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha sedangkan 1 (satu) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 38,79 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,53 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,68 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa lainnya tumbuh 14,22 persen; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 12,94 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 8,09 persen; dan Jasa Perusahaan tumbuh 8,02 persen. Sementara itu, 1 (satu) lapangan usaha lainnya yang berkontraksi yaitu Konstruksi sebesar 4,68 persen.



Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 34,54 persen. secara secara kumulatif dari Triwulan I s/d III-2022 terhadap Triwulan I s/d III- 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 6,93 persen (c-to-c). Dari Sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 30,85 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 39,31 persen. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat tanpa tambang bijih logam pada Triwulan III-2022: tumbuh 1,85 persen (q-to-q), tumbuh 3,55 persen (y-on-y), dan tumbuh 3,63 persen (c-to-c).



Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 0,74, dimana berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi sektor yang paling berkontribusi adalah pengadaan listrik dan gas naik dari 10,85 menjadi 11,53, transportasi dan pergudangan juga naik 3,24 persen dari 16,05 menjadi 19,29 dan real estate mengalami kenaikan 1,18 persen pada triwulan ke III tahun 2022. Sektor konstruksi bahkan mengalami penurunan hingga mencapai -1,38 dari 0,57. NTB sudah mampu berbenah diri pasca covid melanda 2 tahun terakhir yang mempengaruhi ekonomi global dan regional, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi kota dan kabupaten tertinggi dalam pencapaian kontribusi kenaikan pertumbuhan ekonomi NTB.

Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Triwulanan (y on y) (Persen)

Lapangan Usaha [Seri 2010]	2018	2019	2020	2021	2022-TW III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.01	1.38	-0.41	1.14	2.44
Pertambangan dan Penggalian	-33.87	0.18	27.66	-0.15	23.68
Industri Pengolahan	1.68	4.07	-2.41	2.10	0.19
Pengadaan Listrik dan Gas	1.55	11.01	8.87	7.73	12.94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.82	3.64	4.19	0.49	3.67
Konstruksi	2.71	12.22	-14.26	8.94	-4.68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.45	6.37	-4.98	1.72	1.88
Transportasi dan Pergudangan	2.13	1.34	-31.36	2.14	26.53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4.99	-0.03	-28.24	1.35	38.79
Informasi dan Komunikasi	5.18	4.12	12.38	4.98	2.73
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.77	1.40	11.12	4.39	2.32
Real Estat	4.50	4.76	1.04	1.47	5.69
Jasa Perusahaan	4.95	5.01	-3.44	0.33	8.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.03	3.63	2.92	1.74	8.09
Jasa Pendidikan	5.15	7.04	0.82	1.67	3.90

Lapangan Usaha [Seri 2010]	2018	2019	2020	2021	2022-TW III
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.85	6.11	-2.38	7.87	0.82
Jasa lainnya	4.84	5.47	-6.20	1.65	14.22
PDRB (Dengan Tambang)	-4.50	3.90	-0.62	2.30	7.10
PDRB (Tanpa Tambang)	3,20	4,74	-5,17	2,85	3,55

2. Inflasi

Dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat NTB pada 3 tahun terakhir menunjukkan progress yang baik walaupun diangka yang tetap berkisar antara 3,0-4,0. Berdasarkan data BPS Bulan Oktober Tahun 2022 inflasi gabungan Kota Mataram dan Kota Bima sebesar -0,06 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 0,45 persen; dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,27 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,31 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,30 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,28 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,24 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,16 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,08 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,05 persen; Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen; dan Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen. Inflasi Gabungan Dua Kota tahun kalender di Bulan Oktober 2022 sebesar 5,85 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun kalender Bulan Oktober 2021 sebesar 1,44 persen. Sedangkan inflasi "tahun ke tahun" di Bulan Oktober 2022 sebesar 6,57 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi "tahun ke tahun" di Bulan Oktober 2021 sebesar 1,90 persen.

Perkembangan Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima (Persen), 2018 - 2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	TW III 2022
Inflasi	3,16	1,87	0,6	2,12	5,88

Pada Bulan Oktober 2022, terdapat lima komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi, yaitu Beras, Rokok Kretek Filter, Bensin, Tempe, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.. Sedangkan lima komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Angkutan Udara, Cabai Rawit, Telur Ayam Ras, Cabai Merah, dan Bawang Merah. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi antara lain adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,0867 persen; dan Kelompok Transportasi sebesar 0,0545 persen.

Inflasi Bulanan Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) Tahun 2020–2022



3. Tingkat Kemiskinan

Salah satu prioritas pembangunan NTB adalah menurunkan angka kemiskinan dengan 2 strategi yaitu peningkatan kesejahteraan dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat, 2 hal ini diupayakan terus dilakukan di Tahun 2022 dengan harapan penurunan angka kemiskinan NTB dapat mencapai target 11,92 persen di Tahun 2023, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan hingga 0,338 namun penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin mengalami penurunan hingga 0,12. Kemiskinan merupakan faktor yang akan sangat mempengaruhi prioritas pembangunan penting lainnya yaitu pendidikan dan kesehatan, perlu adanya perbaikan implementasi penanggulangan kemiskinan yaitu dengan menyajikan data sasaran lokasi dan bentuk intervensi program yang tepat.

Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2022 sebesar 13,68 persen, menurun 0,15 persen poin dibanding September 2021 yang sebesar 13,83 persen. Dan menurun 0,46 persen poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 14,14 persen. Selama September 2021 – Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,10 persen, yaitu dari Rp 441.711,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp 459.826,- per kapita per bulan pada Maret 2022.

Perkembangan Inflasi Gabungan Kota Mataram dan Kota Bima (Persen), 2018 - 2022

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
Maret 2018	14,75	737,46
Sep 2018	14,63	735,62
Maret 2019	14,56	735,96
Sep 2019	13,88	705,68
Maret 2020	13,97	71,89
Sep 2020	14,23	746,04
Maret 2021	14,14	746,66
Sep 2021	13,83	735,5
Maret 2022	13,68	731,94

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2022, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,55 persen pada garis kemiskinan. Komoditi beras dan rokok kretek filter

menjadi dua komoditi utama yang berperan dalam garis kemiskinan di NTB baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada perkotaan, peranan komoditas beras sebesar 21,95% sedangkan di pedesaan sebesar 25,30%. komoditi rokok kretek filter berpengaruh sebesar 9,73% dan sebesar 8,47% di pedesaan. Selain dua komoditi tersebut, daging ayam ras, telur ayam ras dan mie instan turut menjadi komoditi makanan penyumbang garis kemiskinan di NTB.

4. Gini Ratio

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB pada Gini Ratio Penduduk Nusa Tenggara Barat pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,373% atau mengalami penurunan sebesar 0,011 poin dibanding September 2021 yang sebesar 0,384. Dan menurun 0,008 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,381. %. Capaian ini belum memenuhi target Gini Ratio NTB Tahun 2022 sebesar 0,329%.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini diperkotaan dan pedesaan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Sementara itu pada tahun 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh indeks gini di daerah perkotaan pada Maret tahun 2020 tercatat sebesar 0,337 naik 0,004 point dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,333. Indeks gini di 2019 2020 2021 2022 Perkotaan 0,333 0,405 0,420 0,329 Pedesaan 0,401 0,336 0,331 0,329 Perkotaan + Pedesaan 0,379 0,374 0,376 0,386 0,381 0,384. Target capaian di Tahun 2022 adalah 0,329 dan target 2023 adalah 0,297, kondisi ini masih berbanding terbalik di pedesaan, ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan. Ketimpangan ekonomi di desa relatif lebih baik, tidak setinggi tren tiga tahun terakhir di daerah perkotaan, hal ini mengindikasikan masyarakat di daerah pedesaan kesejahteraannya lebih merata, hal ini juga menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan baru disektor pariwisata sudah mulai tumbuh kembali.

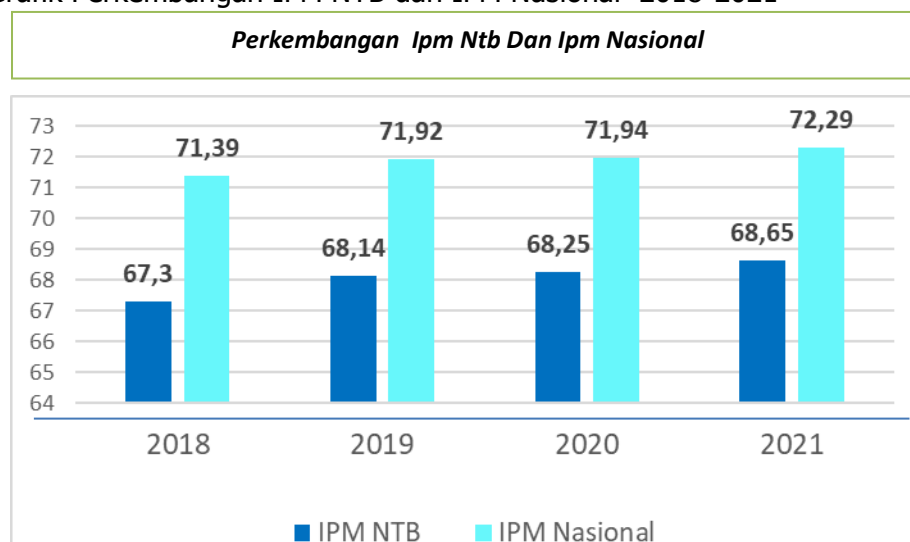
Tahun	Gini Ratio Perkotaan +Pedesaan	Gini Ratio Perkotaan	Gini Ratio Pedesaan
Maret 2018	0,372	0,393	0,333
Sep 2018	0,391	0,422	0,343
Maret 2019	0,379	0,407	0,34
Sep 2019	0,374	0,401	0,333
Maret 2020	0,376	0,403	0,337
Sep 2020	0,386	0,405	0,336
Maret 2021	0,381	0,413	0,332
Sep 2021	0,384	0,42	0,331
Maret 2022	0,373	0,406	0,325

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Maret 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,35 persen, yang berarti provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada Tahun 2019 IPM NTB mengalami peningkatan antara target dan realisasi yaitu 0,07 dimana 68,07 mengalami peningkatan menjadi 68,14, namun target ditahun 2020 mengalami peningkatan hingga 68,44 dan tahun 2021 68,84, IPM NTB masih berada pada kategori IPM sedang. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, level IPM Provinsi NTB memang masih berada di bawah Nasional. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan IPM, NTB termasuk yang paling baik selama periode Tahun 2019 – 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 0,55 persen per tahun. Namun kondisi diatas tidak serta merta menunjukkan keadaan yang jauh lebih baik karena NTB masih dalam kondisi pendapatan penduduk masih cukup rendah, sarana pendidikan yang tidak seimbang dengan jumlah anak usia sekolah dan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Dalam satu dekade pembangunan manusia di Provinsi NTB antara tahun 2010 sampai dengan 2019 terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,21 persen per tahun. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Provinsi NTB, yang menyebabkan pertumbuhan IPM Provinsi NTB mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 1,06 persen per tahun. Pada tahun 2020, IPM Provinsi NTB tercatat sebesar 68,25 atau tumbuh 0,16 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kemudian IPM Provinsi NTB tahun 2021 adalah sebesar 68,65 atau tumbuh 0,59 persen. Pelambatan capaian disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, hal ini dapat dilihat dari pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan yang sudah mencapai Rp.10, 64 juta pada tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19) dan menurun menjadi Rp.10,38 juta pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2,72 persen.

Grafik Perkembangan IPM NTB dan IPM Nasional 2018-2021



Adapun komponen IPM lainnya seperti Usia harapan Hidup (UHH), Rata-rata lama sekolah (RLS), dan harapan lama sekolah (HLS) masih tetap tumbuh positif namun mengalami perlambatan. periode 2010 hingga 2021, UHH Provinsi NTB telah meningkat sebesar 2,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,40 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi NTB adalah 63,82 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 66,69 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, UHH Provinsi NTB tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami perlambatan, tumbuh 0,35 persen

dan 0,27, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai 0,62 persen. Sementara itu, HLS Provinsi NTB telah meningkat 2,24 tahun, sementara RLS meningkat 1,65 tahun. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, HLS Provinsi NTB tahun 2020 dan tahun 2021 masih tumbuh 0,22 persen dan 0,20 persen. Sedangkan RLS Provinsi NTB tumbuh 0,04 persen pada tahun 2020 dan 0,07 persen pada tahun 2021, melambat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,24 persen.

Adanya perlambatan peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) salah satunya disebabkan oleh masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). Dalam 3 tahun terakhir AKB di NTB cukup tinggi mencapai lebih dari 800 kasus per tahun, sementara kasus kematian Ibu juga meningkat dalam tiga tahun terakhir dari 97 kasus pada tahun 2019 menjadi 144 kasus pada tahun 2021. Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menekan kematian bayi dan kematian ibu, yang salah satunya melalui revitalisasi posyandu. Jumlah Posyandu tahun 2021 sebanyak 7.581 Posyandu atau mengalami peningkatan sebanyak 107 posyandu jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 7.474 posyandu, dan yang menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 7.581 Posyandu (100%). Secara kuantitas telah meningkat dan telah mencapai target yang diharapkan (100%), namun secara kualitas masih harus ditingkatkan lagi khususnya integrasi kegiatan/pelayanan, masih banyak yang belum terintegrasi, baik kegiatan Kesehatan maupun kegiatan dengan sector lain (PAUD, Bank Sampah, BKB, BUMDES, UMKM). Disamping itu, juga dilakukan determinasi terutama pada pernikahan dini, Adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/Pemberian Makan bayi balita yang tidak tepat, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Akses sanitasi dan air bersih dan ibu hamil serta remaja putri tidak mengkonsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah.

II. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1. Indeks Kriminalitas

Indeks kriminalitas dipengaruhi oleh seberapa banyak kasus kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun yaitu kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap hak milik dengan kekerasan, kejahatan terhadap barang/hak milik tanpa kekerasan dan kekerasan narkotika. NTB menargetkan pada Tahun 2022 adalah 14,05 dengan capaian yang diharapkan di Tahun 2023 adalah 13,25.

Dalam mewujudkan kondusivitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1380 kasus atau 20%. Penurunan kasus kriminalitas berimplikasi pada penurunan indeks kriminalitas dari 13,09 poin pada tahun 2020 menurun menjadi 10,67 poin pada tahun 2021. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap.

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Kriminalitas	Point	17,25	12,71	13,09	14,85	10,67	128,15	14,05	NA	

2. Indeks Aksesibilitas

Dalam menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, pemerintah provinsi NTB terus mendorong untuk meningkatkan kemantapan jalan terutama yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tabora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata, mewujudkan konektivitas transportasi publik, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membangun perumahan yang layak dan aman, menguatkan sistem irigasi yang mantap untuk meningkatkan produksi pangan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air minum bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur daerah yang memadai ditandai dengan terus meningkatnya indeks aksesibilitas di NTB 77,77 poin pada tahun 2020 meningkat menjadi 78,81 poin pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 1,34%.

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Aksesibilitas	Point	74,6	76,02	77,77	78,56	78,81	100,32	79,84	NA	

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Aspek lain sebagai bagian dalam menggambarkan daya saing daerah adalah kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi NTB pada tahun 2021 mencapai 69,89 poin atau melampaui target sebesar 67,98 poin. Tingginya angka IKLH Provinsi NTB menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi NTB.

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	75,16	64,56	70,83	67,98	69,89	102,81	68,00	NA	
2	Indeks Kualitas Air	Point	74,63	40,23	50,98	42,83	45,10	105,30	42,93	44,20	102,96
3	Indeks Kualitas Udara	Point	87,17	87,40	88,63	87,53	88,52	101,13	87,56	89,07	101,72

4	Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	67,49	70,29	80,22	114,13	87,63	89,48	102,11
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	66,56	65,67	66,14	67,70	65,59	96,88	68,70	65,60	95,49

4. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana

Persentase pemanfaatan ruang NTB terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimana Kawasan lindung meliputi kawasan bawahannya yaitu kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram sedangkan kawasan budidaya meliputi peruntukan kawasan hutan produksi kawasan perkebunan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman, proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya NTB adalah 20 persen untuk kawasan lindung dan 80 persen untuk kawasan budidaya, pemanfaatan rencana tata ruang di atur dalam perda RTRW NTB, yang saat ini sedang dilakukan tahapan revisi. Berdasarkan data badan koordinasi penataan ruang daerah kesesuaian pemanfaatan ruang dengan dokumen rencana dapat dikategorikan 58,6 persen sesuai dengan rencana, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian tersebut, seperti kondisi sosial masyarakat yang banyak melahirkan sengketa-sengketa pemanfaatan ruang NTB. Target kedepannya dengan lahirnya perda terbaru terkait penataan ruang NTB diharapkan mampu menciptakan pemanfaatan ruang yang tepat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemanfaatan ruang di NTB tahun 2021 sebesar 76,38% menurun sebesar 1,62% dibandingkan tahun sebelumnya yang sudah mencapai 78%. Tahun ini Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pemanfaatan ruang sebesar 89,69%.

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	-	-	78	89,03	76,38	85,79	89,69	NA	

5. Indeks Risiko Bencana

Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan kondisi geografis, klimatologis, topografis dan sosiologis termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Dari 14 jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia, 11 diantaranya terjadi di Provinsi NTB. Secara geografis, Provinsi NTB terletak pada lempengan bumi yaitu Lempeng Indo-Australia (bagian selatan) dan Lempeng Eurasia (bagian utara) sehingga rentan dengan gempa bumi. Begitu pula dengan kondisi klimatologis yang dapat menimbulkan cuaca ekstrim dan angin puting beliung. Dari segi kondisi topografis yang berbukit-bukit memberi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Adapun kondisi kebencanaan Provinsi NTB 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Kejadian Bencana Provinsi NTB 2018 - 2020

No	Jenis Bencana	2018	2019	2020	Jumlah
1	Banjir	44	13	28	85
2	Banjir Bandang	8	3	15	26
3	Tanah Longsor	9	4	13	26
4	Angin Putting Beliung	13	45	32	90
5	Kekeringan	9	9	9	27
6	Kebakaran hutan dan lahan	0	6	3	9
7	Gempa Bumi	5	3	1	9
8	Tsunami	0	0	0	0
9	Letusan Gunung api	0	0	0	0
10	kebakaran pemukiman	0	9	5	14
11	kecelakaan transportasi	0	0	0	0
12	gelombang pasang	3	3	2	8
13	konflik sosial	1	0	0	1
14	Aksi teror/sabotase	0	0	0	0
15	Wabah Penyakit	0	0	10	10
	Jumlah	92	95	118	305

Capaian indeks risiko bencana (IRB) di Provinsi NTB tahun 2021 sebesar 122,33 poin dan sudah melampaui target IRB Tahun 2021 sebesar 123,11 poin. Capaian ini menurun sebesar 5,72 poin dibanding tahun 2020 dengan capaian IRB sebesar 128,05 poin.

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Risiko Bencana	Point	136,78	128,05	128,05	123,11	122,33	100,63	119,41	NA	

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

Salah satu langkah dalam mereformasi birokrasi adalah dengan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB No. 17/2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan PermenPANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, pemerintah provinsi NTB telah mengalihkan pejabat pengawas dan administrator menjadi pejabat fungsional, dimana sebanyak 742 orang pejabat fungsional di lingkup Pemprov NTB, terdiri dari pejabat eselon III pengawas dan eselon IV administrator yang telah dialihkan menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan ini dilakukan untuk menghadirkan sosok ASN yang secara kelembagaan kecil, lincah dan produktif dengan memperbanyak, memperkaya jabatan – jabatan fungsional yang harus diisi oleh ASN – ASN yang kompeten dan profesional kedepannya.

Sementara itu, dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Kemajuan teknologi yang begitu cepat juga menuntut birokrasi beradaptasi dengan cepat pula. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). SPBE ke depannya akan diterapkan dalam berbagai layanan publik dan administrasi digital pemerintah yang terintegrasi. SPBE juga akan dimanfaatkan dalam transaksi elektronik pada setiap aspek layanan, termasuk penggunaan big data pemerintah dan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Dengan capaian berbagai komponen yang mejadi bagian reformasi birokrasi, maka penilaian keberhasilan Reformasi Birokrasi pada suatu instansi pemerintah diukur melalui suatu indeks yang disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Pada tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi telah mencapai level B.

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	CC	B	B	B	B	100	BB	NA	

7. Indeks Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan pelayanan publik, dilakukan pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan public di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan pada 6 aspek, yaitu Aspek Kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Aspek Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan. Untuk provinsi, kualitas pelayanan publik yang dinilai dan dievaluasi adalah DPMPSTSP dan Samsat. Sampai dengan tahun 2021, Nilai SAKIP Provinsi NTB telah mencapai level BB, sedangkan indeks SPBE telah mencapai 2,94 poin. Adapun IPP menuju level 3,54 (kategori baik).

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021			TW III 2022		
						Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,56	3,63	3,56	4,23	3,54	83,69	4,53	NA	

III. ASPEK PELAYANAN UMUM

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pendidikan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Pendidikan								
1	Indeks Pendidikan	Point	62,39	63,21	101,32	62,74	NA	0,00	63,10
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68	13,90	101,61	13,73	NA	0,00	13,79
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,01	7,38	105,28	7,04	NA	0,00	7,07
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Indeks Pendidikan (Point)		62,39	63,21	101,32	62,74	NA	0,00	63,10
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		13,68	13,90	101,61	13,73	NA	0,00	13,79
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		7,01	7,38	105,28	7,04	NA	0,00	7,07
4	Persentase APK SMA/MA/SMK/Paket C		99,15	106,41	107,32	99,95	NA	0,00	
5	Persentase APM SMA/MA/SMK/Paket C		93,4	96,65	103,48	95,28	NA	0,00	
6	Persentase APS SMA/MA/SMK/Paket C		96,68	98,08	101,45	97,57	NA	0,00	
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas / Rombongan Belajar		1:1	1:0,92	92,00	1:1	1: 0.89	89	
8	Persentase APK PK-PLK		69,4	84,19	121,31	70	NA		
9	Rasio Guru Terhadap murid pendidikan Menengah (SMA, SMK)		1:18	1:11	163,64	1:18	1:10	180	
10	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk SLB		1:8	1:5	160,00	1:12	1:5	240	

B. Capaian Program

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB menjalankan 6 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja urusan Pendidikan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Pengelolaan Pendidikan (Termasuk : Generasi Emas NTB, Re-Engineering Smk, Paud Hi, Ayo Bercita-Cita, 1000 Cendikia/Beasiswa, Stipark); Program Pengembangan Kurikulum (Termasuk : Sekolah Aman Bencana); Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Program Pengendalian Perizinan Pendidikan; Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra (Termasuk : Rumah Bahasa).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yg ditetapkan		Capaian Kinerja		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu	

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yg ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	4.479.478.607.469	BB	1.024.318.414.196		1.021.848.760.609
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Termasuk : Generasi Emas NTB, Re-Engineering SMK, PAUD HI, Ayo Bercita-Cita, 1000 Cendikia/Beasiswa, STIPark)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214.496.782	99,95	535.221.521.608		18.898.813.613
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28	-	94,38			
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02	-	97,57			
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6	-	70			
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1	-	1			
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18	-	1:18			
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10	-	1:12			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM (Termasuk : Sekolah Aman Bencana)	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.986.884.736	100	116.294.000		108.405.006
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004.195	100	67.210.384.280		51.353.796.947
	Persentase Guru SMK yang	%	100	-	99,58			

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yg ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
	memenuhi Kualifikasi S1/DIV							
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100	-	100			
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100	-	60,00			
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80,00	-	6,00			
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,50	194.889.101	100	48.631.600		38.584.824
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA (Termasuk : Rumah Bahasa)	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187	35			

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapi hambatan – hambatan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut dirinci berdasarkan bidang, yaitu :

1) Kendala Bidang PSMA

- a) Ada 2 Sekolah rehab yang tidak dapat dilaksanakan di KLU karena keliru dalam pemetaan dimana bangunan eksistingnya adalah konstruksi semi permanen bantuan gempa sehingga tidak bisa dilakukan rehab seharusnya pembangunan kembali.
- b) Pembangunan toilet di SMAN 1 Masbagik, dari 8 paket yang bisa dikerjakan hanya 3 paket karena terkendala luas lahan
- c) Terjadi kelambatan distribusi bahan baku untuk pembangunan karena sekolah berada di daerah 3T yaitu SMA Labuan Badas yang berlokasi di Pulau Moyo, solusi yang dilakukan yaitu melakukan pengadaan barang di daerah sekitar pulau Moyo dengan penyesuaian harga (perhitungan khusus) dan menempatkan 2 (orang) fasilitator teknis

2) Kendala Bidang PSMK

- a) Kesulitan dalam mendata siswa yang telah lulus dan bekerja
RTL : melakukan pelayanan legalisir ijazah dengan syarat alumni harus mengisi form pendataan lulusan; membuat tracer study dengan memanfaatkan medsos.
- b) Rendahnya kompetensi lulusan
- c) Terbatasnya guru produktif pada bidang SMK

3) Kendala Bidang Pendidikan Khusus (PK)

- a) SLB masih membutuhkan pengadaan USB atau Unit Sekolah Baru namun dalam pelaksanaannya terkendala dengan kepemilikan lahan

- b) Proses pemberian perizinan SLB swasta mengalami kesulitan karena izin seharusnya diterbitkan oleh DPMPTSP namun belum ada pelimpahan kewenangan kepada DPMPTSP;
 - c) Terbatasnya pemahaman SDM terkait tata cara penyusunan dokumen kurikulum 1 dan kurikulum 2 terutama pada SLB Swasta
 - d) Terbatasnya guru dengan kualifikasi pendidikan luar biasa
 - e) SDM di sekolah terbatas untuk menyusun dan melaporkan penyaluran BOS di sekolah
 - f) Koordinasi dengan sekolah terkait penggunaan dana BOS belum maksimal
 - g) Keterlambatan penginputan data siswa ke dalam aplikasi DAPODIK sehingga berdampak terhadap penyaluran dana BOS masing-masing sekolah
 - h) Terbatasnya SDM penunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Guru Pembimbing Khusus)
 - i) Kurangnya sosialisasi pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif
 - j) Belum ada grand design pengembangan pendidikan inklusif
- 4) Kendala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
- a) Masih ada guru, kepek yang belum S1
 - b) Kepala sekolah banyak yg belum mengikuti program Guru penggerak
 - c) Tidak semua guru memiliki kemampuan dalam pemanfaatan IT
 - d) Tidak adanya jurusan PLB pada Perguruan Tinggi di NTB
 - e) Terbatasnya jurusan Guru Produktif pada Perguruan Tinggi di NTB
 - f) Banyaknya guru yang tidak memenuhi syarat administrasi dan rendahnya nilai pre test PPG
 - g) Terbatasnya DUDI yang akan ditempati sebagai lokasi magang guru
 - h) Distribusi guru belum merata
 - i) Terbatasnya jumlah pengawas sekolah

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Pendidikan yaitu:

- a. Kesulitan melacak lulusan SMK yang bekerja
- b. Data Lulusan SMA yang melanjutkan belum maksimal dalam penyampaiannya terutama untuk sekolah swasta
- c. Terbatasnya guru dengan kualifikasi S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB)
- d. Distribusi guru belum merata
- e. Terbatasnya Guru produktif pada SMK
- f. Masih ada guru yang belum SI / Belum memiliki sertifikat Pendidikan
- g. Proses pemberian perizinan SLB swasta mengalami kesulitan karena izin seharusnya diterbitkan oleh DPMPTSP namun belum ada pelimpahan kewenangan kepada DPMPTSP;
- h. Terbatasnya SDM penunjang pelaksanaan Pendidikan Inklusif (Guru Pembimbing Khusus)

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum H.L Manambai, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, dan Rumah Sakit Mata Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Kesehatan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
KESEHATAN									
Indikator Kinerja Daerah									
1	Indeks Kesehatan	Point	71,97	71,83	99,81	72,43	NA	0,00	73,05
2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	77,00	83,22	108,08	80,00	NA	0,00	83,00
3	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,10	87,78	109,59	80,91	81,59	100,84	82,46
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87	67,08	NA	0,00	67,48
5	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49	19,23	138,93	30,99	16,69	146,14	30,49
6	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
DINAS KESEHATAN PROV. NTB									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,78	66,69	99,87	67,08	NA	0,00	67,48
2	Angka Kematian Ibu (Rate)	Rate	87,00	146,69	31,39	84	58,2	130,71	rg
3	Angka Kematian Bayi (Rate)	Rate	8,00	8,26	96,75	7,5	5,9	121,33	7,00
4	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	31,49	19,23	138,93	30,99	16,69	146,14	30,49
5	Persentase peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
6	Cakupan Desa Open Defecation Free (ODF) (Persen)	%	72,12	82,06	113,78	81,79	100,00	122,26	91,20
RSU PROV. NTB									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
	Akreditasi Rumah Sakit	Level	Paripurna	paripurna	100	Paripurna	paripurna	100	Paripurna
RSJ MUTIARA SUKMA									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
	Akreditasi Rumah Sakit	Level	Paripurna	paripurna	100	Paripurna	paripurna	100	Paripurna
RSUD HL. MANAMBAI									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
	kualitas layanan kesehatan	level	Utama	Utama	100	Paripurna	NA		Paripurna

B. Capaian Program

Urusan Kesehatan dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Rumah Sakit Umum H.L Manambai, Rumah Sakit Jiwa

Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mandalika, dan Rumah Sakit Mata Provinsi NTB dengan rincian program sebagai berikut.

1) Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022					
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Realisasi pagu
					Target Kinerja	Capaian Kinerja				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah (Persen)	%	100	35.943.883.961	100	100	100	28.588.439.561	18.929.432.242	66,21
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Termasuk : Generasi Emas Ntb, Jamban Keluarga/Stop Babs, Air Bersih/Air Minum Untuk Semua, Spam Regional, Wisata Halal&Sehat, Desa Bersinar)		%		12.418.874						
	Persentase Fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	12.418.874	85					
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	%								
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%								
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97	-	97	100	103,09			
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	80	-	100		0,00			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (%)	%	100		100	100	100,00			
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		80	100				
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		90	100	111,11			
	Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	%	100		100	100	100,00			

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022					
					Target di Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Realisasi pagu
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Capaian Kinerja				
	Persentase Kab/Kota yang memiliki Puskesmas mampu melaksanakan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, Remaja, Usia Produktif dan Lansia) sesuai Standar	%	92,9		80	40	50,00			
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	%	40		30					
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	%	100							
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Termasuk: Ntb Berolahraga)	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.405.137	2,5	0,27	42,8	109.853.700	56.001.900	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95		90	100	111,11			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	%	100	5.059.563	70			350.000.000	0	

2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Tingkat Capaian Kinerja (%)	
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	angka	82,5	851.292.197.993	81	285.014.847.504	97,68	87,46
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat	persentase SPM yang mencapai target	%	258	262.761.476.727	85	519.845.818.280	90,81	35,91

3) Rumah Sakit Mata Provinsi NTB

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	Persen	100	17.370.524.356	100	22.893.544.762	54,99	54,88	54,99
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai Standar	Persen	100	16.449.525.166	75	2.129.092.000	10,00	1,26	13,33

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Kesehatan masih dihadapi hambatan – hambatan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut dirinci berdasarkan Perangkat Daerah yang membawahi urusan Kesehatan yaitu :

1) Dinas Kesehatan Provinsi NTB

- a. Pengelola Program di tingkat Kabupaten dan Puskesmas mengalami pergantian/Mutasi (semua program)
- b. Integrasi Posbindu dan Posyandu Keluarga belum Optimal\
- c. Dukungan Lintas Sektor belum maksimal
- d. Keterbatasan BMHP P2PTM
- e. Keberlanjutan program masih belum optimal di Kabupaten/Kota
- f. Integrasi Program belum Optimal (GizPro)
- g. Terbatasnya sumberdaya Antropometri Posyandu (GizPro)
- h. Tidak semua Program mendapatkan dukungan Anggaran
- i. Survei akreditasi FKTP (Puskesmas) dan Labkes belum dilaksanakan, menunggu kebijakan dan arahan Kemenkes
- j. Pembayaran iuran PBP/BU belum bisa dilaksanakan menunggu MOU Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (dana sharing) dan mekanisme pembayaran dana sharing
- k. Refocusing Anggaran
- l. Ketidaksesuaian struktur organisasi Provinsi dan di Kab/Kota sehingga koordinasi sering terputus
- m. Keterisian ASPAK untuk Update data dan kondisi alat kesehatan masih rendah karena seringnya pergantian pengelola ASPAK di Dinkes Kab/Kota maupun Puskesmas dan tidak adanya transfer pekerjaan dari pengelola lama ke pengelola baru sehingga pengelola baru susah mengakses ASPAK.
- n. Kompetensi Petugas Puskesmas dalam melaksanakan intervensi lanjut hasil PIS-PK masih rendah
- o. Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan alkes sesuai standar masih rendah
- p. Sistem rujukan terintegrasi belum optimal terkendala pada sistem IT (SISRUITE) belum maksimal di semua faskes

- q. Belum semua kab/Kota mempunyai PSC dan system IT PSC antara Kab/kota belum maksimal karena terkendala jaringan, IT dan sumberdaya lain
 - r. Sistem pelaporan terintegrasi melalui SIM RS belum maksimal karena perbedaan SIM RS setiap RS
 - s. Kurangnya pemahaman Pelaksanaan Posyandu Keluarga sampai ke tingkat Desa
 - t. Kurangnya Integrasi Program & Linsek di Posyandu
 - u. Masih terbatasnya sarana prasarana dan media edukasi di posyandu
 - v. Anggaran terkait penyakit Neglected (terabaikan) tidak mendapatkan perhatian
 - w. Surat Keterangan CATIN sehat dari Puskesmas belum menjadi syarat administrasi di KUA
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
- a. Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia di rumah sakit
 - b. Belum optimalnya penelitian oleh SDM rumah sakit
 - c. Belum optimalnya pelayanan keperawatan
 - d. Belum optimalnya pelayanan medis
 - e. Belum optimalnya pelayanan penunjang
- 3) Rumah Sakit H. L Abdul Kadir Manambai
- a. Upaya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal melalui evaluasi indeks kepuasan masyarakat terkait dengan respon time pelayanan
 - b. Kurang Optimalnya kinerja Information Technology (IT) di Rumah Sakit
 - c. Saat ini RS H.L. Manambai Abdulkadir sedang mempersiapkan IT Mandiri, dimana saat ini adanya upaya pengintegrasian sistem IT secara keseluruhan penambahan beberapa modul terkait dengan sistem inventory, sistem kepegawaian, sehingga diharapkan dapat lebih efisien dan efektif
 - d. Masyarakat Kab. Sumbawa masih memiliki anggapan bahwa RSMA adalah rumah sakit rujukan dari RSUD Sumbawa
 - e. Terbatasnya peralatan RS. Dengan adanya gedung-gedung pelayanan yang dibangun di RSMA terdapat beberapa peralatan yang harus dipenuhi, termasuk juga penggantian peralatan yang rusak
 - f. Ketersediaan suplai air bersih
- 4) Rumah Sakit Umum H.L Manambai
- 5) Rumah Sakit Jiwa Mutiara SUkma
- a. Ketersediaan sistem informasi dan digitalisasi pelayanan (pendaftaran online, SIMRS, elektronik rekam medik/resep) belum berjalan baik
 - b. Adanya perubahan standar akreditasi dari SNARS edisi 1.1 menjadi STARKES
 - c. Tindak lanjut dari hasil monitoring evaluasi SPM dan IKM belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan tepat
 - d. Kesulitan akan pemenuhan Kebutuhan upaya peningkatan kompetensi dan jamin mutu sumber daya manusia RS yang sangat variatif dan berjumlah besar

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Kesehatan yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan
 - a. Angka Harapan Hidup masih jauh dibawah AHH Nasional
 - b. Masih tingginya jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kematian Bayi
 - c. Penyakit Menular dan Tidak Menular masih tinggi
 - d. Stunting masih menjadi masalah (inputan e_ppgbm baru mencapai 91.43%)
 - e. Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi masih rendah
 - f. Kegiatan Penerapan Antigen Baru Vaksinasi
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB
"Belum optimalnya kualitas pelayanan dan sumber daya manusia rumah sakit"
- 3) Rumah Sakit H. L. Abdul Kadir Manambai
 - a. Pemenuhan SDM (Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis dan Tenaga Ahli Lainnya)
 - b. Pemenuhan Sarana/Prasarana Rumah Sakit
- 4) Rumah Sakit Umum H.L Manambai
- 5) Rumah Sakit Jiwa Mutiara SUkma
 - a. Perbaiki layanan kesehatan jiwa di tingkat fktp dan rujukan
 - b. Peningkatan akses layanan kesehatan jiwa di tingkat fktp dan rujukan
 - c. Upaya penurunan treatment gap gangguan jiwa
 - d. Upaya penurunan stigma gangguan jiwa dan pemenuhan hak asasi manusia
 - e. Upaya penurunan beban biaya layanan kesehatan jiwa dengan peningkatan kompetensi fktp, perbaikan sistem rujukan, pemberdayaan di masyarakat
 - f. Pengembangan upaya promotif dan preventif di rs melalui pers
 - g. Kemitraan dan pemberdayaan stakeholder, koordinasi program
 - h. Penjaminan mutu dan keselamatan pasien melalui akreditasi rs
 - i. Pemberlakuan sistem informasi dan digitalisasi dalam pelayanan dan administrasi rs
 - j. Pencapaian manajemen blud rs yang sehat
 - k. pelayanan kesehatan jiwa dengan teknologi

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD					2022			Target Akhir RPJMD (2023)
			2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Tk Capaian	
DINAS PUPR PROVINSI NTB											
1.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Indikator Kinerja Daerah											
1	Indeks Aksesibilitas	Point	73.7	74.6	76.02	77.77	78.81	79.84	NA	0.00	81.17
2	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	-	-	-	78.00	76.38	89.69	NA	0.00	90.31
3	Persentase Kemantapan jalan	%	77.2	83.7	80.28	80.05	84.01	85.36	NA	0.00	86.60

4	Cakupan Air Minum	%	-	70.5	72.59	74.88	78.76	78.45	NA	0.00	80.59
5	Persentase Kemandapan Sistem Irigasi	%	50.5	50.6	50.76	57.07	50.88	52.17	NA	0.00	54.50
6	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0.00	0.00	9.09	18.18	NA	0.00	27.20
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah											
1	Cakupan Areal layanan Jaringan Irigasi (%)	%					50.88	52.17	NA	0.00	54.50
2	Persentase Jaringan Jalan yang terkoneksi (%)	%									
3	Persentase Jalan mantap (%)	%					84.01	85.36	NA	0.00	86.60
4	Cakupan Air Minum (%)	%					78.76	78.45	NA	0.00	80.59

B. Capaian Program

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan 13 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembangan Permukiman, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Penataan Bangunan Gedung, dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	%	100,00	154.693.666.971	100	54.388.503.136		41.252.896.393
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	342.401.082.017	75,37	93.568.301.850		69.039.435.512
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000	78,45	1.997.599.789		630.556.709
Program Penyelenggaraan Jalan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	931.804.007.968	85,36	514.270.557.414		185.410.601.093
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82.96	300.000.000	80.90	216.823.400		209.980.000
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Luas Layanan Drainase	Km2	594,93	37.749.587.000	576,59	9.964.810.229		5.403.374.849
Program Pengembangan Permukiman	Terpadunya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Kawasan	6,00	3.713.279.001	2,00	2.603.022.300		2.142.378.582

Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Daya Serap Jasa Konstruksi bersertifikat	%	7,00	2.448.827.000	7,00	339.938.000	140.137.587
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900	89,69	330.782.000	138.014.584
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengelolaan sampah	%	70,00	200.000.000	60,00	17.180.307.200	4.796.764.400
Program Penataan Bangunan Gedung	Daya tumbuh wilayah strategis	%	31,98	77.636.915.000	29,08	7.384.030.500	3.561.604.587
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Daya tumbuh wilayah strategis	%	31,98	5.775.510.000	29,08	7.735.140.500	2.763.042.355

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi NTB masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.

Permasalahan dan Kendala Sumber Daya Air:

- Tingginya kerusakan saluran irigasi, bangunan sungai dan pantai;
- Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum optimal dan merata;
- Layanan jaringan irigasi belum optimal;
- Infrastruktur SDA banyak mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kurangnya pemeliharaan;
- Tata kelola Sistem Informasi Sumber Daya Air tidak optimal;
- Terbatasnya peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infra-struktur Sumber Daya Air.

Permasalahan dan Kendala Bina Marga

- Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau;
- Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai;
- Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu;
- Terbatasnya aksesibilitas bagi daerah potensial terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah;
- Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
- Potensi kerusakan infrastruktur jalan yang cukup tinggi akibat bencana alam.

Permasalahan dan Kendala Cipta Karya:

- Belum maksimalnya cakupan layanan air minum yang meliputi ketersediaan air baku, jaringan perpipaan, kelembagaan, koordinasi stakeholder dan pendanaan;
- Masih rendahnya pengelolaan sanitasi dasar;
- Banyak terjadi kerusakan jaringan air minum akibat bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi;
- Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas;

- e. Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian gedung belum tertib kurang mencerminkan bangunan gedung yang andal (tahan gempa, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan), Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Penataan Bangunan dan Lingkungan, dan pengelolaan sanitasi belum optimal;
- f. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman masih terbatas
- g. Tata kelola sistem informasi keciptaan karya yang belum optimal.

D. Isu Strategis

Adapun Isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, antara lain:

- a. Kinerja layanan jalan masih belum optimal dalam mendukung sektor unggulan dan kawasan strategis
- b. Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku yang mengakibatkan turunnya produktivitas pertanian akibat tidak optimalnya pengelolaan irigasi
- c. Terdapat ketimpangan Keterpaduan Infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.
- d. Inkonsistensi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi
- e. Rendahnya tenaga konstruksi yang memenuhi standar nasional dan lemahnya pengawasan pada kegiatan jasa konstruksi
- f. Kualitas bahan bangunan untuk konstruksi bangunan Pemerintah maupun Swasta masih ada yang belum sesuai standar atau baku mutu yang dipersyaratkan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NTB									
1,1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
	Indikator Kinerja Daerah								
1	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	62,65	63,47	101,31	65,80	NA	0,00	68,95
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	51,18	51,18	100	99,8	99,8	100
2	Rumah tangga menempati hunian layak	%				98,86	92,74	93,81	98,91
3	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%				65,8			68,95

4	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha				84488			84511
5	Persentase rumah yang layak huni	%	62,65	63,47	101,31	65,80	NA	0,00	68,95
6	Persentase rumah masyarakat miskin dalam kondisi baik	%	20,4	23,6	115,69				
7	Persentase kawasan permukiman dengan prasarana sarana utilitas umum dalam kondisi baik	%	93,91	93,7	99,78	94,01			
8	Luasan prasarana dalam kondisi baik	Ha	85	95,31	112,13				

B. Capaian Program

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB menjalankan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	28.728.267.404	100	8.849.377.969		6.403.893.988
Program Pengembangan Perumahan (Termasuk : Rumah Layak Huni)	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.063.959.946	100	459.662.300		200.299.427
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91	-	98,86			
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%	68,95	26.144.370.835	65,80	2.698.574.564		174.868.965
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253.391	587.290.665.869	84.488	151.009.194.250		85.493.681.907

5. Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Provinsi NTB dan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Ketentraman dan

ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
SATPOL PP PROVINSI NTB									
1,1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,41	31,21	576,89	5,72	55,00	961,54	6,07
2	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	20,00	18,92	94,60				
2	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%	60,68	53,85	88,74				
3	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	%	2,56	2,56	100,00	62,50			
BPBD PROVINSI NTB									
1,1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Indeks Risiko Bencana	Point	123,11	122,33	100,63	119,41	NA	0,00	115,83
2	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	20,97	51,38	245,04	25,58	NA	0,00	30,18
3	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,61	0,63	103,28	0,63	NA	0,00	0,65
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,61	0,63	103,28	0,63	NA	0,00	0,65

B. Capaian Program

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Termasuk: Bale Mediasi, Desa Bersinar).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	BB	54.892.010.634	BB	16.568.876.616		12.749.764.710
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Termasuk: Bale Mediasi, Desa Bersinar)	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban	%	100,00	11.445.268.038	100,00	2.949.907.859		1.595.163.293

Mediasi, Desa Bersinar)	Umum dan Ketentraman Masyarakat							
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	-	100,00			

Sedangkan program pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB sebanyak 2 program, yaitu:

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	22.262.865.781	BB	6.760.061.762		5.021.316.360
Program Penanggulangan Bencana	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445.499.395	32,78	2.897.254.000		2.282.380.522
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50	-	67,34			

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi NTB masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala pada Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

- Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparaturnya dan badan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang masih kurang
- Sarana prasarana penunjang tugas lapangan masih belum memadai akibat pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi
- Kualitas dan kuantitas SDM POLPP masih belum memadai khususnya dalam menjangkau cakupan wilayah tugas Provinsi NTB

Sedangkan kendala pada BPBD yaitu:

- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kegiatan, ditemukan permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :
- Minimnya kapasitas personil teknis perencanaan penanggulangan bencana, dan kedaruratan penanggulangan bencana.
- Keterbatasan sarana/prasarana penanggulangan bencana.
- Koordinasi penanggulangan bencana belum optimal.
- Maraknya pengrusakan lingkungan untuk kepentingan ekonomi.

D. Isu Strategis

Adapun isu-isu kebencanaan terkait tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anggaran kebencanaan sebesar 1% dari APBD yang diamanatkan dalam Perda Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana belum terkoordinir.
- b. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana di kabupaten/kota.
- c. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di kabupaten/kota se NTB.
- d. Kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana masih kurang memadai.
- e. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- f. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Urusan Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan urusan Sosial dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
DINAS SOSIAL PROVINSI NTB									
1,1	Sosial								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	4,87	13,21	271,25	5,12	3,21	62,70	5,37
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase peningkatan rehabilitasi sosial terhadap PMKS	%	3	29,31	977	3	29,31	977	
2	Persentase Peningkatan Penanganan Fakir Miskin	%	100	100	100	100	97,04	97,04	
3	Persentase Peningkatan penanganan bagi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase capaian penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh PSKS	%	3	8,86	295,33	3	8,86	295,33	

B. Capaian Program

Dinas Sosial Provinsi NTB menjalankan 7 Program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemberdayaan Sosial (Termasuk: Melawan Kemiskinan Dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan), Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Termasuk: Ramah Difabel), Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	99.836.536.615	BB	32.243.701.855		24.025.454.184
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Termasuk : Melawan Kemiskinan Dari Desa/Penanggu langan Kemiskinan)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	%	100	38.556.948.963	100	5.813.616.000		1.353.696.641
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635	100	465.862.650		262.781.190
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,50	53.397.902.044	3,50	9.834.701.500		7.437.343.019
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Termasuk: Ramah Difabel)	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612	100	7.152.566.000		2.620.302.341
Program Penanganan Bencana	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993	100	819.100.000		563.773.750
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	%	100	1.090.197.282	100	188.909.050		51.604.814

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Sosial masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Belum optimalnya updating data dan pemanfaatan /penggunaan satu data dalam penanganan kemiskinan.
- Keterbatasan SDM dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan NTB Ramah Difabel dan Melawan Kemiskinan dari Desa.

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai

dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Sosial Provinsi NTB, antara lain:

- Penanganan Fakir Miskin berbasis Keluarga
- Pecepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Penanganan PMKS melalui penerapan SPM
- Penanganan PMKS melalui penerapan SPM

7. Urusan Tenaga Kerja

A. Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan urusan Tenaga Kerja dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Tenaga Kerja								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,30	3,01	108,79	3,19	3,92	77,12	3,17
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase penyerapan angkatan kerja	%	96,7	96,99	100,30	96,81	96,08	99,25	96,83
2	Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif	%	98,95	98,97	100,02	99,06	99,33	100,27	99,16

B. Capaian Program

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Porsentase kab/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	300.351.716,17	100,00	100.214.713,00	100,00	23.346.900	100,00
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	17	3.481.991.780	17	1.232.588.784	13,97	589.955.784	82,16
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.	%	51,09	3.391.251.944	51,09	1.115.004.982	12,22	460.681.493	23,92
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan perusahaan	%	22	1.025.630.908	22	337.215.752	18	460.234.500	80,95
Program	Porsentase	%	21				12,34		56,08

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Pengawasan Ketenagakerjaan	perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3			3.466.483.656	22	1.139.740.312		367.186.800	

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Tenaga Kerja masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Permasalahan dan Kendala tersebut antara lain :

- Angkatan kerja di NTB masih didominasi oleh pendidikan SMP kebawah
- Masih rendahnya kesempatan kerja pada dunia usaha,
- Maraknya PMI Unprosedural karena kurangnya informasi pasar kerja
- Belum optimalnya peran perangkat hubungan industrial dan sistem pengawasan ketenagakerjaan Belum optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan
- Masih banyak pekerja formal/ informal yang belum terlindungi Jamsostek
- Belum adanya penetapan kawasan baru karena masih ada lahan yang belum clean and clear
- Masih banyaknya tunggakan Sertifikat Hak Milik (SHM)

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Tenaga Kerja antara lain:

- Masih terbatasnya industri menengah dan besar di NTB
- Perlindungan terhadap tenaga kerja yang belum maksimal

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD (2023)
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
DP3AP2KB PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,81	52,54	87,84	61,16	52,54	85,91	61,40

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD (2023)
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,46	90,50	100,04	90,49	90,50	100,01	90,52
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,70	20,20	97,58	20,90	20,39	97,56	21,00
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	27,13	145,86	19,27	27,13	140,79	20,47
5	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	60,00	50,00	83,33	80,00	70,00	87,50	100,00
1,2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04	1,39	66,35	1,00	1,82	18,00	0,95
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah								
1	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	%	39,13	100	255,56				
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,46	90,50	100,04	90,49	90,50	100,01	90,52
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	59,81	52,54	87,84	61,16	52,54	85,91	61,40
4	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	18,60	27,13	145,86	19,27	27,13	140,79	20,47
5	Cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak	%	60,00	50,00	83,33	80,00	70,00	87,50	100,00
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	%	68,15	100	146,74	83,25	100	120,12	100,00
7	Pertumbuhan penduduk	%	1,04	1,39	66,35	1,00	1,82	18,00	0,95
8	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,70	20,20	97,58	20,90	20,39	97,56	21,00

B. Capaian Program

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB menjalankan 9 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	100	6.231.111.877	52,17	818.824.700	35,42	38.995.000	68%
Program	Persentase	%			4				0%

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Perlindungan Perempuan	Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif					303.973.700		33.489.160	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Index Ketahanan Keluarga	Indeks	15,5	1.340.778.160	5	226.417.200		57.547.400	0%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dokumen Gender	Dok	3	200.537.842	1	37.994.600		-	0%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	100	1.490.733.932	80	385.272.800	60	74.193.791	75%
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	3	2.001.008.091	1	381.553.900		36.905.400	0%
Program Pengendalian Penduduk	Pendewasaan Usia Perkawinan	%	62,6	1.122.043.710	20,9	186.617.000		17.890.400	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	112	1.032.157.764	11,98	133.416.000			
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak	Persen	80	1.003.858.561	100	468.570.800			

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut, antara lain :

- Belum optimalnya komitmen dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan indeks pemberdayaan gender
- Belum optimalnya komitmen Kabupaten Kota dalam mewujudkan kab kota layak anak
- Belum optimalnya kualitas SDM dalam pencapaian IDG (Perwakilan Perempuan Di Legislatif, Profesional, Sumbangan Pendapatan) dan penanganan kasus kekerasan di UPTD
- Tujuan dan sasaran perangkat daerah bukan merupakan hasil kerja secara langsung dari OPD karena peran DP3AP2KB masih hanya menjalankan fungsi koordinasi

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, antara lain:

- Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi masih rendah dan berada di urutan ke 34 nasional dari 34 provinsi
- Strata Kab Kota Layak Anak belum optimal

9. Urusan Pangan

A. Capaian Kinerja Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan urusan Pangan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD (2023)
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB									
1,1	Pangan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,20	90,40	104,87	86,70	93,30	107,61	87,20
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Komoditas Pangan Strategis (Persen)	%	100,00	457,78	457,78	100,00	716,23	716,23	100,00
2	Nilai Coefisien Variasi (CV) Komoditas Pangan Strategis	Skor	<10	2,26	100,00	<10	1,21	100,00	<10
3	Tingkat konsumsi protein	(Kkal/Kap/Hari)	70,33	74,00	105,22	70,73	77,20	109,15	71,32

B. Capaian Program

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB menjalankan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Realisasi		
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	%	86,62	770.871.786	79,62	300.963.367		-	-
Program Peningkatan				11.466.150.864		3.778.523.930		739.312.820	

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan energi	KKal/kapita/tahun	6.466,67	303.393.880,00	5.653,33	100.158.000	5105	23.214.270	90,30
	Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100,00	770.949.100,00	100,00	278.000.000	100	50.504.000	100,00
	Persentase stok cadangan pangan pemerintah	%	10,80	1.018.510.000	7,20	405.000.000	5,94	152.566.000	82,45
	Tingkat konsumsi energi	KKal/kapita/hari	2.640,80	9.373.297.883	2.563,50	2.995.365.930	2.442	513.028.550	95,26
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.268.451.063	4,77	485.048.161	1,78	345.743.300	162,68
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	1.857.153.698	85,00	679.047.614	100	158.302.000	117,65

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pangan masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Masih adanya Daerah (Kecamatan dan Desa) dengan kategori rentan rawan pangan
FSVA Provinsi :
 - 4 Kecamatan Prioritas II : Sandubaya-Kota Mataram, Batu Layar-Lobar, Rasanae Timur dan Asakota-Kota Bima
 - 2 Kecamatan Priotas III : Sekarbela-Kota Mataram dan Raba-Kota Bima)
 FSVA Kabupaten/Kota : 233 Desa (20,38%) dari 1143 Desa se NTB terkategori Prioritas 1,2 dan 3
- b. Masih adanya penduduk dengan Asupan Kalori Minimum di bawah standar nasional
(2,97% atau 152.340 Jiwa dari Penduduk NTB Rp. 5.125.622 Jiwa)
- c. Fluktuasi harga dan pasokan pangan pokok strategis (Cabe dan Minyak Goreng)
- d. Masih tingginya tingkat konsumsi beras penduduk NTB 119,1 Kg/Kap/tahun
- e. Rendahnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar

10. Urusan Lingkungan Hidup

A. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS LHK PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	67,98	69,89	102,81	68,00	NA	0,00	68,25
2	Indeks Kualitas Air	Point	42,83	45,10	105,30	42,93	44,20	102,96	43,03
3	Indeks Kualitas Udara	Point	87,53	88,52	101,13	87,56	89,07	101,72	87,59
4	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,29	80,22	114,13	87,63	89,48	102,11	87,66
5	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	70,00	49,02	70,03	85,00	50,42	59,32	100,00
6	Persentase Penanganan Sampah	%	50,00	39,68	79,36	60,00	39,68	66,13	70,00
7	Persentase Pengurangan Sampah	%	20,00	9,34	46,70	25,00	10,74	42,96	30,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	%	90	50	55,56	10	NA		
2	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien	%	100	100	100,00	100	NA		
3	persentase Penanganan sampah	%	50,00	39,68	79,36	60,00	39,68	66,13	70,00
4	persentase Pengurangan sampah	%	20,00	9,34	46,70	25,00	10,74	42,96	30,00

B. Capaian Program

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menjalankan 16 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern), Program Pendidikan Dan Pelatihan, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengelolaan Persampahan.

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja
			Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Kinerja	Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	260.285.729.075,77	BB	86.345.636.322,63	BB	56.107.606.406	100,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Kajian lingkungan hidup yang	%	100	1.024.902.302,60	100,00	337.210.647,80	100,00	66.318.116	100,00

	telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangun								
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	1.695.180.783,58	100	710.941.851,29	0,00	66.694.000	-
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase taman kehati yang dikelola	%	100,00	128.583.400,00	100	50.000.000,00	0	56.677.100	-
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan	%	100	232.426.464,11	90	100.000.000,00	0,00	-	-
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan	%	100	605.251.863,75	100	199.138.369,13	100,00	54.786.221	100,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	641.333.478,89	100	211.009.846,82	100	50.003.900,00	100,00
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional	%	30	632.449.873,25	10	208.086.986,36	-	70.795.400,00	-
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503,30	2.843.299.455,57	30.503,30	935.494.874,85	30503,3	316.123.200,00	100,00
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS	32	82.983.248.577	32	33.205.711.287	-	15.312.368.800,00	-
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	%	100	3.148.514.551,19	85	4.200.871.889,62	85	10.496.148.000,00	100,00
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	%	100	3.148.514.551,19	85	1.098.160.935,50	50,42	1.488.957.171	59,32

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Belum optimalnya penanganan sampah karena jumlah sarana angkutan sampah di Kabupaten/Kota masih minim (17% dari kebutuhan)
- Banyak tempat pengolahan sampah (TPS3R) yang tidak aktif
- Belum tersedia data infrastruktur pelayanan persampahan berbasis desa

- d. Kabupaten/Kota masih fokus pada penanganan sampah
- e. Belum optimalnya skema pengurangan sampah berbasis desa
- f. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya reduce, reuse, recycle)

11. Urusan Pertanahan

A. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pertanahan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
SEKRETARIAT DAERAH									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Pertanahan								
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

B. Capaian Program

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi NTB menjalankan 1 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Kesejahteraan Rakyat.

Uraian Variabel Yang Di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798,42	100	62.642.899.700	56,62	18.113.545.100	56,62

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DPMPDes PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio Penduduk BerKTP	rasio	0,84	1,08	128,57	0,86	0,70	81,40	0,88

	Persatuan Penduduk								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	97,6	99,6	102,05	97,8	96,97	99,15	98
2	Persentase Opd/badan hukum yang memanfaatkan data adminduk	%	100	100	100	100	100	100,00	100
3	Persentase peningkatan status desa berkembang dan maju	%	90	87,56	97,29	92	80,69	87,71	95

B. Capaian Program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB menjalankan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90		98,80	23.917.510	96,97	28.659.000	98,15
Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	85.820.600	100	72.031.408	100	15.540.200	100
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota	%	100	182.010.364	100	288.781.809		40.736.890	0
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	%	100	5.000.000	100	5.000.000		1.000.000	0

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi NTB masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Penyelarasan Program dari Tingkat Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Kabupaten/Kota, belum optimal
- Integrasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB belum terlaksana dengan optimal, khususnya untuk pelaksanaan Program/Kegiatan yang lokusnya di Desa.

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB adalah Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil untuk Perencanaan Program Pembangunan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DPMPDes PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Pemberdayaan Masyarakat Desa								
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	29,01	43,44	149,74	31,28	26,46	84,58	33,69
2	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	86,00	92,74	107,84	88,00	94,53	107,42	91,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	97,6	99,6	102,05	97,8	96,97	99,15	98
2	Persentase Opd/badan hukum yang memanfaatkan data adminduk	%	100	100	100	100	100	100,00	100
3	Persentase peningkatan status desa berkembang dan maju	%	90	87,56	97,29	92	80,69	87,71	95

B. Capaian Program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB menjalankan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	A	10.665.856.778	A	10.578.636.016		7.205.123.023	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25	119.143.303	20	56.804.086	5,58	131.739.800	27,90
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	%	92	334.829.312	82	281.030.742	0,25	355.093.183	0,30
Program Pemberdayaa	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	9.389.913.5	27	7.924.383.03	53,44	1.978.677.7	197,93

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
n Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	100	16	80	2	95,04	62	146,22
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100		80		85,13		170,26
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96		56,41		65,81		116,66

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi NTB masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Penyelarasan Program dari Tingkat Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Kabupaten/Kota, belum optimal
- b. Integrasi dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB belum terlaksana dengan optimal, khususnya untuk pelaksanaan Program/Kegiatan yang lokusnya di Desa.

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, antara lain:

- a. Belum optimalnya kerjasama antar desa dan antara Desa dengan Pihak Ketiga, dalam pengembangan potensi kawasan, yang berakibat pada kurang optimalnya perkembangan ekonomi di perdesaan serta minimnya akses pemasaran hasil produksi komoditi Unggulan Desa.
- b. Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan Desa, serta tata kelola Aset Desa.
- c. Kurangnya pengembangan kapasitas informasi di Desa
- d. Kurang optimalnya pengelolaan potensi Sumber Daya Alam di Desa, melalui pemanfaatan temuan Teknologi Tepat Guna, serta belum tersusunnya Peta Tematik Potensi Desa (Kawasan Perdesaan).

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD (2023)
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	
DP3AP2KB PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1,2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1,04	1,39	66,35	1,00	1,82	18,00	0,95
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Pertumbuhan penduduk	%	1,04	1,39	66,35	1,00	1,82	18,00	0,95
2	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20,70	20,20	97,58	20,90	20,39	97,56	21,00

B. Capaian Program

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB menjalankan 3 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Pengendalian Penduduk	Pendewasaan Usia Perkawinan	%	62,6	1.122.043.710	20,9	186.617.000		17.890.400	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	112	1.032.157.764	11,98	133.416.000			
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak	Persen	80	1.003.858.561	100	468.570.800			

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- belum optimalnya komitmen masyarakat terkait penurunan angka stunting melalui pendewasaan usia perkawinan
- Tujuan dan sasaran perangkat daerah bukan merupakan hasil kerja secara langsung dari OPD karena peran DP3AP2KB masih hanya menjalankan fungsi koordinasi

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu

diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, antara lain:

- a. Angka perkawinan anak masih tinggi
- b. Angka stunting masih tinggi

15. Urusan Perhubungan

A. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Perhubungan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB									
1,1	Perhubungan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Persentase konektivitas transportasi publik	%	81,71	88,00	107,70	86,86	88,57	101,97	89,14
Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Rute Angkutan Darat	%	92,5	96,67	104,51	95	96,67	101,76	100,00
2	Persentase Rute Angkutan Laut	%	57,69	80,77	140,01	61,54	80,77	131,25	88,46
3	Rasio Kecelakaan Transportasi	Rasio	4,02	3,58	112,30	3,92	1,76	155,10	1,95

B. Capaian Program

Dinas Perhubungan Provinsi NTB menjalankan 3 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan Program Pengelolaan Pelayaran.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	27.968.523.446	BB	9.314.962.119		6.614.531.463
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14.665.159.820	80.40	7.256.264.955		5.553.500.915
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100,00	-	98.59			

	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40,00	-	35,00			
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58	-	49.39			
Program Pengelolaan Pelayaran	Penilaian Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.260.753.150	61.61	327.090.700		296.180.655

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat menuju daerah wisata, kawasan strategis kawasan potensial dan event
- b. Belum tersedianya angkutan massal perkotaan dan angkutan multimoda yang optimal
- c. Kurangnya fasilitas penunjang operasional pelabuhan di Provinsi NTB
- d. Masih kurangnya SDM teknis di bidang perhubungan laut
- e. Belum optimalnya operasional dan pengelolaan terminal penumpang tipe b di Provinsi NTB
- f. Masih kurangnya SDM teknis di bidang pengelolaan terminal
- g. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas
- h. Masih kurangnya PPNS perhubungan
- i. Minat masyarakat terhadap penggunaan sepeda sebagai alat transportasi masih rendah
- j. Belum optimalnya infrastruktur untuk sepeda
- k. Minat masyarakat untuk berjalan kaki masih rendah
- l. Belum optimalnya pembatasan kualitas emisi gas buang angkutan umum
- m. Belum optimalnya penyedia fasilitas khusus kaum difabel pada sarana dan prasarana angkutan umum
- n. Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus bagi kaum difabel di Pelabuhan
- o. Belum optimalnya penyediaan fasilitas khusus Kaum difabel pada angkutan laut dan penyeberangan

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB, antara lain:

- a. Rendahnya konektivitas transportasi
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas
- c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan
- d. Transportasi ramah lingkungan
- e. Rendahnya kesadaran pada kaum difabel

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

A. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS KOMINFOTIK PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Komunikasi dan Informatika								
1	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif	Transaksi	101,38	Transaksi	NA	0,00	Kolaborasi
2	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50,00	59,09	118,18	65,00	NA	0,00	75,00
Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	50	56,5	113,04	65,0	NA	0,00	75
2	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Interaktif	Transaksi	101,38	Transaksi	NA	0,00	Kolaborasi

B. Capaian Program

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah pada urusan komunikasi dan informatika, yaitu Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target		Realisasi		
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik Sesuai Standart KIP (%)	%	80	6.702.957.548	70	5.599.748.172	-	2.169.968.392	33,71
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Berbasis TIK	%	65	2.463.868.840	55	2.058.351.844	-	84.000.000	10,74

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan urusan komunikasi dan informatika masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut antara lain :

- Keterbatasan fasilitas teknologi informasi yang di miliki KIM
- Terbatasnya kewenangan antara pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan urusan yang bersifat lintas sektoral
- Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan pembinaan KIM
- Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan pengembangan kualitas SDM KIM

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada urusan komunikasi dan informatika antara lain:

- Penerapan Pasal 27, 28, 29 UU ITE
- Penerapan Good Governance yang didukung teknologi informasi belum optimal.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI NTB									
1,1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Persentase Koperasi Aktif	%	65,00	76,12	117,11	67,00	NA	0,00	70,00
Sasaran Perangkat Daerah									
1	Pertumbuhan koperasi modern	%	3	3	100,00	100	NA		8,2
2	Persentase pertumbuhan KSP/USP yang menerapkan pola syariah	Koperasi	12,65	13,92	110,04	15	10	66,67	19,2
3	Jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	UKM	30	3	10,00				50

B. Capaian Program

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB menjalankan 9 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Program Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, Program Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dan Program Pengembangan UMKM.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		
					Target Kinerja	Target Pagu	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTB	Nilai SAKIP	%		12.735.000.000	100	11.450.290.346	
Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan Koperasi Modern	Kop		1.100.000.000	100	323.632.620	
Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penumbuhan KSP/ USP yang menerapkan Pola Syariah	Kop	20	1.500.000.000	100	1.569.589.200	10
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang berkualitas	%		1.600.000.000	100	881.314.100	
Program Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah	Dok		3.000.000.000	100	2.409.280.000	
Program Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Kapasitas SDM UMKM yang ditingkatkan	%		1.500.000.000	100	723.925.800	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTB	Nilai SAKIP	%		1.033.033.355	100	830.226.400	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Kapasitas SDM Koperasi yang ditingkatkan	%		2.771.087.430	100	755.238.200	
Program Pengembangan UMKM	Persentase Kapasitas SDM UMKM yang ditingkatkan	%		496.962.150	100	1.752.725.800	

18. Urusan Penanaman Modal

A. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Penanaman Modal dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI NTB									
1,1	Penanaman Modal								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362,00	14.879,27	111,36	15.428,00	14.341,00	92,95	68201,79

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	13.362,00	14.879,27	111,36	15.428,00	14.341,00	92,95	68.201,79

B. Capaian Program

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB menjalankan 6 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Termasuk : Ramah Investasi/Online Service), Program Promosi Penanaman Modal (Termasuk : Kawasan Samota), Program Pelayanan Penanaman Modal (Termasuk : Mall Investasi & Pelayanan Publik), Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Termasuk: KEK Mandalika), dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022 Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi	% Realisasi Pagu
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI LAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	Nilai A (83-85)			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Termasuk : Ramah Investasi/Online Service)	Persentase Peningkatan Investor	%	10%	724.463.980,27		596.026.769	69.907.100	13,41	
Program Promosi Penanaman Modal (Termasuk : Kawasan Samota)	Persentase Calon investor yang berinvestasi	%	80%	1.050.026.807,99	60%	863.871.915	202.668.900	99,90	
Program Pelayanan Penanaman Modal (Termasuk : Mall Investasi & Pelayanan Publik)	Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	%	93%	780.295.837	90%	641.960.427	19.736.500	98,68	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Termasuk: Kek Mandalika)	Persentase perusahaan yang taat LKPM	%	60%	1.079.612.987,74	55%	9	393.893.786	58,25	
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	%	100%	171.027.294,00	100%	140.706.575	-	0,00	

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Penanaman Modal masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban penyampaian LKPM
- Banyak perusahaan tidak memenuhi komitmen yang disyaratkan pada sistem OSS sesuai dengan bidang usaha yang dimiliki

- c. Pelaku usaha kurang memahami sistem OSS-RBA karena banyak Fitur yang berbeda dengan sistem OSS 1.1

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Penanaman Modal, antara lain:

- Pengembangan Iklim Investasi (Memberikan Kenyamanan Bagi Pelaku Usaha)
- OSS-RBA Terdapat Kelemahan Dalam Pelaksdanaan Perizinan Karena Adanya Dualisme Interpretasi Terhadap Pasal 181 Pp 5 Th 2021 Dan Ego Sentris Dari OPD Teknis
- Pengembangan IPRO (Investment Projek Ready To Offer)

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

A. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB									
1,1	Kepemudaan dan Olah Raga								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35,00	41,00	117,14	40,00	48,00	120,00	210,00
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15,00	6,00	40,00	15,00	14,00	93,33	15,00
3	Proporsi wirausaha muda	%	68,18	68,07	99,84	68,28	68,35	100,10	68,39
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Jumlah Medali Atlit Berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional	Medali	35	41,00	117,14	40,00	48,00	120,00	45
2	Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional	orang	15	6,00	40,00	15,00	15,00	100,00	15
3	Persentase Wirausaha Pemuda	%	68,18	0,00	0,00	68,18	68,28	100,15	68,39

B. Capaian Program

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB menjalankan 3 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip DISPORA	Nilai	A (>80-90)	28.688.902.994	BB (>70-80)	8.167.127.863		6.027.897.269
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.296.717.332	100	2.954.270.110	100	817.289.538
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	-	100			
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31.488.202.013	100	16.953.234.440		12.375.373.213

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Kurang memadainya sarana prasarana olahraga untuk mendukung atlet berprestasi
- Prestasi olahraga belum maksimal
- Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah
- Soliditas OKP

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, antara lain:

- Terbatasnya sarana prasarana olahraga yang memenuhi standar
- Frekuensi event kejuaraan
- Kontribusi dunia usaha/dunia industri/swasta
- Mindset menjadi aktivis preneur

20. Urusan Statistik

A. Capaian Kinerja Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Statistik dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS KOMINFOTIK PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Statistik								
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	30,00	98,74	329,13	50,00	NA	0,00	65,00
Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Data Prioritas Berkualitas Pada Perangkat Daerah	%	30	98,3	327,73	60,0	NA	0,00	65

E. Capaian Program

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB menjalankan 1 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja pada Urusan Statistik, yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target		Realisasi		
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	605.446.229	25	505.798.580		10.290.000	8,44

F. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Statistik masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Terbatasnya anggaran dalam meningkatkan kualitas SDM dan Sarana Prasarana
- Respon tindak lanjut NTB Care masih rendah
- Tingkat partisipasi publik juga rendah

G. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Statistik, antara lain:

- Pemutakhiran data dan informasi pada NTB Satu Data belum optimal.
- Mewujudkan NTB Satu Data yang lebih optimal

21. Urusan Persandian

A. Capaian Kinerja Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis

Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Persandian dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS KOMINFOTIK PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,3	Persandian								
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+	II	81,60	III	II	58,62	III+
Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	II+	II	81,60	III	II	58,62	III+

B. Capaian Program

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB menjalankan 1 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja pada Urusan Persandian, yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target		Realisasi		
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah	%	50	493.138.545	40	493.138.545	14.463.250	8,62	

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Penyelenggaraan NTB Satu Data belum sepenuhnya mengacu pada SOP karena beberapa admin produsen data di OPD belum mengunggah data secara langsung di Portal NTB Satu Data sehingga masih dibantu oleh admin walidata
- Pengumpulan data oleh beberapa produsen Data masih melampaui dari batas waktu kesepakatan yang sudah ditentukan

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Persandian yaitu Meningkatkan Keamanan Data / Informasi.

22. Urusan Kebudayaan

A. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Kebudayaan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Kebudayaan								
2	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	24,35	37,00	82,14	37,00	37,00	37,00	33,04

B. Capaian Program

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Pengembangan Kebudayaan (Termasuk : NTB Juara), Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Pengembangan Kebudayaan (Termasuk : NTB Juara)	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759	72,73	2.382.930.000		1.107.969.650
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736	100	107.435.800		91.221.600
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	105.697.700		71.587.493
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya				2.087.837.054		149.999.800		-
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	%	28,57	4.706.027.313	42,86	1.535.538.300		823.105.585

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Kebudayaan yaitu:

- Tidak semua Kab/kota Memiliki Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB)
- Belum semua kabupaten / kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya, dan untuk kab/kota yang sudah memiliki TACB belum didukung oleh pendanaan
- Pemugaran Cagar Budaya (CB) masih terkendala dengan minimnya alokasi dana
- Terbatasnya Sarpras
- bahkan bagi kabupaten / kota yang sudah memiliki TACB belum di dukung oleh ketersediaan anggaran
- Jumlah CB dan WB yang akan dikembangkan tidak sinkron dg dana yang tersedia.

23. Urusan Perpustakaan

A. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Perpustakaan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PERPUSDA PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,1	Perpustakaan								
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00	100,00
2	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	31,89	32,76	102,74	35,87	34,76	96,90	39,86
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13,95	17,66	126,59	17,66	17,66	17,66	

B. Capaian Program

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB menjalankan Program Pembinaan Perpustakaan sebagai program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.644.842.711	100	15.977.763.850	75	2.953.906.450	75

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Perpustakaan masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program, antara lain :

- Adanya refocusing (keterbatasan anggaran) pada program yang mendukung program unggulan literasi digital yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan secara langsung dan/atau faktual dilapangan;
- Terdapat penundaan atas pelaksanaan kegiatan yang disebabkan situasi dan kondisi saat ini (pembatasan aktivitas SDM).

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Perpustakaan yaitu :

- Masih rendahnya minat baca masyarakat;

- b. Belum terwujudnya jumlah dan kapasitas perpustakaan yang memadai, terlihat dari Sarana prasarana perpustakaan di Perpustakaan Daerah Provinsi NTB yang masih sangat kurang (koleksi bahan bacaan maupun fasilitas pendukung (Interior dan Meubelair gedung perpustakaan yang sesuai standar)
- c. Belum optimalnya sistem administrasi kearsipan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas

24. Urusan Kearsipan

A. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Perpustakaan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PERPUSDA PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Kearsipan								
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	66,67	67,45	101,18	83,33	73,08	87,70	100,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase arsip daerah yang terpelihara	%	66,67	67,45	101,17	67,45	67,45	67,45	

B. Capaian Program

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB menjalankan 1 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624.349.814	100	68.807.000	75	10.486.000	75

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Kearsipan masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Adanya refocusing (keterbatasan anggaran) pada program yang mendukung program unggulan literasi digital yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan secara langsung dan/atau faktual dilapangan;
- b. Terdapat penundaan atas pelaksanaan kegiatan yang disebabkan situasi dan kondisi saat ini (pembatasan aktivitas SDM).

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Kearsipan yaitu :

- Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- Belum terwujudnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

A. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB									
1,1	Kelautan dan Perikanan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75	5,02	105,67	4,75	4,76	100,30	4,74
2	Produksi Perikanan	Ton	1436947,00	1175295	81,79	1468104	895347,95	60,99	1499957
3	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	116,58	105,98	>110	116,20	100,00	>110
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Produksi Perikanan	ton	1436947,00	1175295	81,79	1468104,00	895347,95	60,99	1499957
2	Nilai Tukar Nelayan	%	2,23	3,34	149,78	>110	116,20	100,00	>110
3	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	52	51,12	98,31	51,5	51,12	99,26	56,00
4	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	%	1,96	1,81	92,35				
5	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	2,23	3,34	149,78				

B. Capaian Program

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menjalankan 6 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Termasuk : Industri Perikanan : Garam, Tepung Ikan, Penataan 3 Gili Klu Dan Pulau-Pulau Kecil), Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Termasuk : Budidaya Lobster, Krpl/P2I), Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Uraian Variabel yang diukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022		Capaian Kinerja		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian nilai sakiip terhadap target	%	100	27.274.409.818	100	24.716.047.099	18.486.915.300	A	100

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang dikelola secara berkelanjutan	%	4,51	3.898.497.368	4,51	3.547.589.201	3.312.063.716	4,25	94,24
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	3.950.682.784	249,099	3.431.042.793	4.786.175.595	176.608,01	70,90
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	3.794.515.654	1.219.005	1.768.769.576	5.341.633.710	718.740	76,33
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perUU (%)	%	99,93	106.793.114	99,92	151.147.779	2.078.203.688	67,50	67,55
Program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215.700	727.951.667	214.373	1.171.290.491	20.640.000	85.200	39,74

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Harga pakan yang terus meningkat tidak relevan dengan peningkatan harga produksi
- b. Menurunnya daya dukung dan daya tampung perairan akibat abrasi, sampah plastik, pencemaran dan penyakit
- c. Terbatasnya ketersediaan benih unggul
- d. Cakupan kapal perikanan yang terdaftar dan berizin masih sangat minim
- e. Terbatasnya ketersediaan sarana rantai dingin
- f. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan
- g. Kenaikan biaya operasional penangkapan ikan tidak selalu diikuti dengan inflasi harga ikan
- h. Terbatasnya akses nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi pasca kenaikan harga BBM
- i. Fasilitasi asuransi nelayan sangat tergantung pada alokasi dekonsentrasi
- j. Tingkat konsumsi ikan masih rendah jika dibandingkan dengan ketersediaan
- k. Belum optimalnya Diversifikasi, pengawasan dan pembinaan mutu dalam rangka peningkatan nilai tambah produksi
- l. Dukungan terhadap promosi dan kampanye Gemarikan masih terbatas
- m. Nilai Evika masih pada level minimum = Belum optimalnya pengelolaan KKD karena terbatasnya input anggaran
- n. Konflik pemanfaatan ruang laut masih banyak terjadi
- o. Belum optimalnya system pengawasan dan penertiban izin usaha pelaku usaha KP dan terbatasnya input anggaran operasional pengawasan
- p. Masih marak terjadinya Destructive fishing
- q. Belum optimalnya dukungan untuk pengembangan produk unggulan

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Kelautan dan Perikanan yaitu :

- Belum optimalnya kontribusi sector perikanan terhadap produk domestic regional bruto;
- Pertumbuhan produksi perikanan cenderung fluktuatif;
- Belum optimalnya kinerja program unggulan dan industrialisasi;
- Belum optimalnya pengelolaan Potensi Sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Degradasi kualitas lingkungan dan ekosistem laut dan pesisir;
- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- Belum optimalnya diversifikasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

26. Urusan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pariwisata dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB									
1,1	Pariwisata								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	1,50	1,35	90,00	3,00	0,29	9,67	4,50
2	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	60,00	67,68	112,80	80,00	67,68	84,60	100,00
3	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,10	2,23	71,94	3,25	2,01	61,85	3,35
4	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.650.000	964.036	20,73	4.850.000	845.600	17,44	23.100.000
5	Persentase Geosites yang Tertata	%	25,00	100,00	400,00	37,50	NA	0,00	50,00
6	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	122,71	15,28	12,45	129,78	90,12	69,44	137,24
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	1.000.000	964.036	96,40	2.000.000	845.600	42,28	3.000.000
2	Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang	%	65,66	67,68	103,08	85,86	67,68	78,83	100
3	Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata yang Kredibel	%	10	15,71	157,10	20	NA		30
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memiliki HaKI	%	30,21	30,43	100,73	35,21	30,97	87,96	40,21
5	Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata yang tersertifikasi	%	60	60,5	100,83	70	NA		75

B. Capaian Program

Dinas Pariwisata Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Termasuk : Penataan 3 Gili KLU&Pulau-Pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani &Tambora, Revitalisasi Islamic Centre), Program Pemasaran Pariwisata (Termasuk: Wisata Halal&Sehat), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja	
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB	43.472.230.668	BB	13.510.299.727		10.648.567.876
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Termasuk : Penataan 3 Gili KLU&Pulau-Pulau Kecil, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani&Tambora, Revitalisasi Islamic Centre)	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580.012.830	85,85	3.108.149.928		733.624.993
	Persentase Geosite yang tertata	%	50,00	-	50,00			
Program Pemasaran Pariwisata (Termasuk: Wisata Halal&Sehat)	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.391.905.747		2.055.655.300		1.532.186.761
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		606.633.173		203.735.000		202.965.486
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Termasuk : KEK Mandalika, Kawasan Samota)	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506.228.054		30.800.000		-

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pariwisata masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Ketersediaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian program strategis dan program unggulan terbatas terlebih lagi adanya kebijakan refocusing anggaran.
- b. Terbatasnya intervensi Dinas pariwisata Provinsi NTB dalam upaya meningkatkan PDRB sektor kepariwisataan.
- c. Pelaksanaan penataan desa wisata dihadapkan pada kendala terbatasnya anggaran dan intervensi dari stakeholder lainnya dalam rangka pengembangan 99 desa wisata.
- d. Pemenuhan aspek 3A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi) bagi desa wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terbatas sehingga masih memerlukan sinergitas dengan berbagai pihak untuk penguatan desa wisata sebagai destinasi berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
- e. Masih rendahnya investasi bidang kepariwisataan sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan industri pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- f. Banyaknya potensi pelaku ekonomi kreatif yang belum dilindungi hak kekayaan intelektual (HaKI) serta terbatasnya akses pasar dan sarana prasarana pengembangan ekonomi kreatif.
- g. Jumlah SDM pariwisata yang tersertifikasi kompetensi masih terbatas tidak sebanding dengan jumlah permintaan tenaga kerja kepariwisataan.
- h. Terbatasnya kemampuan untuk melakukan revitalisasi destinasi wisata unggulan seperti Islamic Center, Pasar Seni Senggigi dan beberapa sarana lainnya di destinasi wisata unggulan daerah.

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB, yaitu :

- a. Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung oleh unsur amenitas, aksesibilitas dan atraksi masih belum memadai sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan.
- b. Masih belum meratanya pengembangan pariwisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa
- c. Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktivitas pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran Bersama dengan para pelaku pariwisata dan stakeholder pariwisata lainnya.
- d. Kualitas dan kapasitas sumber daya pariwisata yang di dukung kelembagaan yang mandiri, sarana dan prasarana yang memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu upaya yang

- terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya dimaksud melalui Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi kompetensi.
- e. Perlunya fasilitasi dalam penyelenggaraan atraksi sebagai daya tarik pariwisata di lokasi-lokasi destinasi wisata sebagai upaya untuk menarik tingkat kunjungan serta untuk mengoptimalisasi pemasaran industri kreatif.
 - f. Investasi pada sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang kondusifnya iklim investasi, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta penyediaan informasi potensi kepariwisataan yang memadai.
 - g. Kemitraan atau Kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau Kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah.
 - h. Adanya potensi penyelenggaraan event internasional dan nasional yang membutuhkan dukungan dalam rangka memperkuat kepariwisataan NTB dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

27. Urusan Pertanian

A. Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pertanian dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB									
1,1	Pertanian								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,52	26,40	112,24	23,71	23,85	100,59	23,88
2	Nilai Tukar Petani	Point	>105	105,73	100,70	>105	106,22	101,16	>105
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	0,35	3,59	1.025,71	0,7	15,58	2225,71	

B. Capaian Program

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern, Industri Peternakan/Pakan Ternak), Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Termasuk: Industri Pangan Dan Holtikultura, Industri Perkebunan, Irigasi Cukup), Program Pengendalian Dan

Penanggulangan Bencana Pertanian , dan Program Penyuluhan Pertanian (Termasuk: KRPL/P2L, NTB Hijau).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022			
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yg ditetapkan		Capaian Kinerja	
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Lakip OPD	Nilai	80,18	141.976.583.682	78	44.174.183.070		33.990.851.744
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern, Industri Peternakan/Pakan Ternak)	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319	1,99	23.797.698.356		7.764.586.313
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Termasuk: Industri Pangan Dan Holtikultura, Industri Perkebunan, Irigasi Cukup)	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055	65,56	107.937.884.588		34.713.383.410
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/paket	10	-	2			
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,50	1.229.042.136	96,00	42.385.000		42.085.300
Program Penyuluhan Pertanian (Termasuk: KRPL/P2L, NTB Hijau)	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100,00	18.894.573.000	70,00	5.394.103.800		3.394.177.032

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Pertanian masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- Produksi beberapa komoditas pertanian cenderung menurun
- Ketidakpastian harga cenderung membuat petani ragu untuk melakukan usaha tani
- Ketersediaan Anggaran Pemerintah yang terbatas sehingga menghambat serapan anggaran
- Harga Saprodi yang cukup mahal dan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan (kurang)

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah

pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, yaitu :

- a. Alih fungsi lahan pertanian;
- b. Tingkat produktivitas lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan cenderung menurun;
- c. Terjadinya perubahan iklim berdampak terhadap upaya pemenuhan ketersediaan pangan;
- d. Kemampuan sumber daya manusia dan Kelembagaan petani dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas;
- e. Kurangnya minat petani muda (milenial) dalam menggeluti bidang pertanian;
- f. Lemahnya akses petani terhadap permodalan dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- g. Ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinyu berimplikasi pada fluktuasi harga;
- h. Perlindungan terhadap tata niaga produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih belum optimal.

28. Urusan Lingkungan Hidup

A. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS LHK PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Kehutanan								
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,70	65,59	96,88	68,70	65,60	95,49	69,70
2	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	10,08	7,29	72,32	15,08	9,18	60,88	20,08
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	%	41	41	100,00	41	NA		
2	Persentase penurunan lahan kritis	%	11,7	4,81	41,11	19,69	NA		

B. Capaian Program

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menjalankan 16 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan

Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Hutan , Program Pengelolaan Hutan, Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern), Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, Program Pengelolaan Hutan, Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Program Pengelolaan Persampahan, dan Program Pengelolaan Persampahan.

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja
			Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Kinerja	Pagu	
Program Pengelolaan Hutan	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	30	14.230.543.400,58	10	4.776.154.424,87	8,94	1.209.438.865	89,37
Program Pengelolaan Hutan	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	41	17.207.045.793,56	41	5.661.416.745,85	41,00	1.955.924.950	100,00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	15,93	2.921.881.515,56	5,49	1.078.593.611,76	-	543.722.400	-
Program Pengelolaan Hutan	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	30	45.278.587.983,43	10	15.011.448.654,70	10,00	7.554.610.200	100,00

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut muncul dari baik dari lingkungan Internal maupun Eksternal, antara lain :

- a. Maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan
- b. Tingginya aktivitas masyarakat dalam Kawasan Hutan terutama disekitar lokasi RHL
- c. Tingkat Keberhasilan Program RHL yang dilaksanakan sangat Rendah < 50%, karena sebagian besar kawasan hutan dan lahan digunakan untuk penanaman Jagung
- d. Komitmen desa belum Optimal
- e. Masih minimnya keterlibatan masyarakat Sekitar dalam ikut Menjaga Kawasan Hutan dan Lahan
- f. HHBK unggul lokal yang cukup banyak potensinya seperti rotan dan bambu belum ada industri pengolahan di dalam daerah
- g. Produksi HHBK unggul skala kelompok (kopi, gula aren/semut, madu, minuman serbuk empon-empon masih belum bisa memenuhi permintaan pasar secara kontinyu, karena terkendala faktor modal, bahan baku, dan faktor manajemen lainnya
- h. Database usaha Kelompok Pengolahan HHBK belum optimal dan dinamis

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS ESDM PROVINSI NTB									
1,1	Energi dan Sumberdaya Mineral								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Rasio Elektrifikasi	%	99,77	99,98	100,21	99,88	99,98	100,10	99,99
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	(%)	99,77	99,98	100,21	99,88	99,98	100,10	99,99
2	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	(%)	15,76	13,04	82,74	17,43	13,04	74,81	19,18
3	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	(%)	100	100,00	100,00	100	60,52	60,52	100
4	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kaidah usaha Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices)	(%)	9	11,90	132,22	31,67	0,0	0,00	39,00

B. Capaian Program

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB menjalankan 5 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (Termasuk : Geopark - Cagar Biosfer Rinjani & Tambora), Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (Termasuk: Industri Pertambangan/ Smelter& Industri Turunannya), Program Pengelolaan Energi Terbarukan, Dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Termasuk: Nusa Terang Benderang)

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target di Dokumen Perencanaan yg ditetapkan		Capaian Realisasi		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	80,00	35.353.874.555	79,00	9.865.496.520	80,38	4.359.441.837	101,75
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian (Termasuk : Geopark - Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	%	100	1.975.352.499	100	139.099.200	0,0	73.918.200	0,00

Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (Termasuk: Industri Pertambangan/ Smelter & Industri Turunannya)	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kaidah usaha Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>)	%	39,00	1.007.823.009	6,25	119.576.300	0,0	60.382.700	0,00
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Prosentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%	5,57	1.882.329.210	5,64	130.469.100	13,04	68.597.142	231,21
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (Termasuk: Nusa Tenggara Banderang)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	RT	2900	5.379.628.786	100	255.882.935	99,98	62.797.000	100

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut dirinci berdasarkan sub urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

NO	SUB URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN	KENDALA
1.	Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi mendakati 100%, namun masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik secara mandiri (khususnya rumah tangga miskin)	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah rumah tangga berlistrik belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan PLN belum dapat menyajikan data pelanggan sesuai dengan kriteria yang ideal dalam perhitungan Rasio Elektrifikasi Data kemiskinan baik yang bersumber dari DTKS maupun TNP2K sebagai dasar pemberian subsidi listrik masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya
		Desa berlistrik di Provinsi NTB sudah mencapai 100% sejak tahun 2018, namun belum seluruh Dusun terjangkau oleh jaringan listrik	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat 34 Dusun di 13 Desa yang sebagian besar di Pulau Sumbawa belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, 5 Dusun diantaranya sudah mendapatkan listrik melalui pembangkit EBT Perluasan jaringan PLN terkendala oleh akses jalan yang tidak memadai untuk menunjang pembangunan jaringan listrik Regulasi kehutanan yang mengharuskan adanya perizinan pinjam pakai kawasan hutan untuk jaringan listrik terutama pada kawasan lindung dan konservasi Keandalan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT tidak sebaik pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil
		Surplus cadangan listrik, belum berdampak pada peningkatan konsumsi oleh industri	<ul style="list-style-type: none"> Penyerapan produksi listrik untuk industri masih rendah, sebagian besar konsumsi listrik pada beban puncak di NTB merupakan pelanggan rumah tangga. Pertumbuhan industri belum dapat menyerap ketersediaan listrik
	Energi Baru Terbarukan	Target bauran energi pada RUED belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar pembangkit PLN masih mengandalkan sumber tenaga fosil (84,09% data PLN Semester 1 Tahun 2022) Belum semua potensi EBT di NTB dimanfaatkan (Potensi Pembangkit EBT 254,6 MW- data PLN) Masih banyak potensi EBT yang belum dimanfaatkan untuk skala usaha ekonomis, usaha di bidang EBT masih belum menarik bagi kalangan investor Investasi pembangkit EBT yang masih mahal Masih sedikit masyarakat yang paham mengenai pentingnya pemanfaatan energi bersih Belum semua sektor memanfaatkan energi bersih dalam menjalankan aktivitas dan usahanya

NO	SUB URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN	KENDALA
		Fasilitas pembangkit EBT yang dibangun oleh Pemerintah banyak mengalami kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> o Minimnya aspek kelembagaan dan aspek teknis dalam pengelolaan pembangkit EBT • Keterbatasan anggaran revitalisasi pembangkit EBT yang mengalami kerusakan • Masuknya jaringan PLN pada daerah 3T membuat pembangkit listrik EBT off grid tidak menjadi prioritas.
	Geologi	Minimnya dukungan Dinas ESDM untuk pengembangan Geopark	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan sub urusan bidang geologi hanya terbatas pada • pengelolaan Air Tanah (penetapan NPA dan Konservasi Air Tanah)
		Pengendalian konservasi air tanah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua CAT di Provinsi NTB dipetakan, 2 dari 9 CAT belum dipetakan, 7 dari 9 CAT yang sudah dipetakan belum dilakukan reviu • Terbatasnya jumlah sumur pantau • Penerbitan perizinan pemanfaatan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
	Mineral dan Batubara	Masih banyak pertambangan tanpa izin	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 Tahun 2020 dimana seluruh kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat • Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara khusus untuk mineral bukan logam dan batuan melalui Perpres 55 Tahun 2022 masih dalam proses transisi yang memerlukan waktu yang lama untuk dilaksanakan • Penerbitan WIUP masih oleh pemerintah pusat • Khusus untuk pertambangan rakyat, masih terkendala oleh penetapan WPR yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
		Tidak ada pendapatan daerah Provinsi dari kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk jenis pajak Kabupaten/Kota, • Penerbitan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi dan pengawalan izin usahanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
		Masih sedikit pelaku usaha pertambangan yang menerapkan Good Mining Practices	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah inspektur tambang Kementerian ESDM masih terbatas • Sebagian besar usaha pertambangan, terutama pertambangan Batuan • merupakan usaha perseorangan dan mikro kecil dan menengah. • Masih terbatasnya jumlah pelaku usaha pertambangan yang memiliki sertifikasi profesi

D. Isu Strategis

Isu strategis terkait kewenangan Provinsi di Bidang ESDM yang perlu diintervensi pada tahun 2024-2026:

- a. Penyediaan akses listrik kepada masyarakat miskin
- b. Perluasan jaringan listrik untuk menjangkau kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) dan Kepulauan
- c. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk bauran energi dan mendukung zero emission
- d. Konservasi air tanah
- e. Konservasi pertambangan mineral dan batubara

30. Urusan Perdagangan

A. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023,

pelaksanaan Urusan Perdagangan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB									
1,1	Perdagangan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Inflasi	%	3,0 - 4,0	2,12	129,33	3,0 - 4,0	5,88	-147,00	3,0 - 4,0
2	Indeks Daya Beli	Point	73,80	71,27	96,57	74,68	NA	0,00	75,56
3	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11273,02	10377,00	92,05	11603,52	NA	0,00	11943,70
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Inflasi Pangan Bergejolak	%	3-4%	3,17	100,00	3,0 - 4,0	7,68		3,0 - 4,0
2	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Tambang	%	1	-8,67	-867	3	18	600,00	5
3	Nilai Pertambahan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. Juta	600.000	632.660	105	750.000	0,00	0,00	900.000
4	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks	50	50	100	51	0	0,00	52

B. Capaian Program

Dinas Perdagangan Provinsi NTB menjalankan 7 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/Ntb Mall).

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	NILAI SAKIP OPD	NILAI	A	11.488.309.027,00	BB	9.753.864.584,00	A	55,58	100
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Penting	%	80	419.000.000,00	70	326.118.500	50	36,95	71
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	8.680.000.000,00	100	5.766.070.650	50	49,10	50

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	430.000.000,00	4	299.496.600	4,99	11,83	125
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	5	1.800.000.000,00	5	778.894.800	18	36,44	360
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	2.550.000.000,00	85		85	78,45	100
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/Ntb Mall)	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	8.264.639.381,00	100	2.271.218.500	30	25,69	30

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Perdagangan masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak kondisi global;
- b. Masih tergantungnya UKM ekspor di NTB terhadap perusahaan-perusahaan diluar daerah;
- c. Masih kurang sadarnya Konsumen akan haknya sehingga tidak melakukan pengaduan ketika merasa dirugikan;
- d. Masih kurangnya Kesadaran Distributor dan Pengecer Perdagangan Minuman Beralkohol dan Bahan Berbahaya dalam Pelaksanaan Tata Niaga;
- e. Masih Rendahnya Partisipasi Distributor Barang Kebutuhan Pokok dalam Pelaksanaan Pasar Murah, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh Kabupaten/Kota;
- f. Masih terjadinya gejolak harga di beberapa Kabupaten yang disebabkan adanya Penimbunan komoditi dan ulah yang dilakukan para tengkulak.
- g. Masih Kurangnya Kuantitas Komoditas Ekspor terutama Komoditi Ekspor –Non Tambang beberapa Kabupaten/Kota.

D. Isu Strategis

Isu strategis terkait kewenangan Provinsi pada urusan perdagangan yang perlu diintervensi pada tahun 2024-2026:

- a. Pengendalian Inflasi
- b. Peningkatan Ekspor
- c. Edukasi Konsumen
- d. Pemberdayaan UKM
- e. Tertib Niaga

31. Urusan Perindustrian

A. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Perindustrian dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB									
1,1	Perindustrian								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Pertumbuhan Industri	%	6,50	6,75	103,85	7,50	NA	0,00	9,00
2	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	166,39	91,30	54,87	173,02	NA	0,00	179,91
3	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	2,69	3,45	128,25	3,14	3,33	106,05	3,55
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase SDM Industri yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20	20	100	NA			30
2	Nilai Investasi Pelaku Industri	Rp. Milyar	166,39	171,02	103	NA			173,02
3	Persentase pertumbuhan Industri	%				NA			7,5
4	Cakupan produk terstandarisasi	%	30	81,82	273				
5	Cakupan penggunaan teknologi dalam proses produksi	%	10	91,43	914				
6	Persentase Pertumbuhan IKM	%	6,5	6,75	104				

B. Capaian Program

Dinas Perindustrian Provinsi NTB menjalankan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022					
			Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	% Realisasi pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan pendukung kesekretariatan OPD	%	100	67,33	67,33	Rp 13.048.976.764	Rp 8.785.565.199	67,33
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	30,57	30,57	Rp 9.620.515.900	Rp 2.941.327.102	30,57
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	7,5	2,16	28,74	Rp 1.497.415.200	Rp 430.415.400	28,74

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	0,37994827	37,99	Rp 463.883.000	Rp 176.251.544	37,99
--	--	---	---	------------	-------	-------------------	-------------------	-------

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Perindustrian masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan urusan perindustrian antara lain :

- a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal
- b. Konsep kebijakan pembentukan kawasan industri lokal yang belum terintegrasi
- c. Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi.
- d. Pendataan industri berbasis sistem yang belum terintegrasi.
- e. Kemampuan IKM yang masih belum kompeten
- f. Mekanisasi pengolahan produk yang masih konvensional dan belum menggunakan intervensi teknologi dan permesinan.
- g. Akses terhadap pembiayaan dan permodalan yang masih terbatas untuk peningkatan skala produksi IKM

Selain permasalahan, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian antara lain :

- a. Kemampuan sumberdaya manusia yang ada di bidang industri masih terbatas
- b. Kemampuan IKM yang masih belum kompeten.
- c. Produk yang dihasilkan masih belum sesuai standar pasar.
- d. Harga produk IKM belum mampu bersaing dengan pasar.
- e. Penggunaan sarana prasarana teknologi yang belum maksimal.
- f. Akses permodalan IKM belum maksimal

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB, yaitu :

- a. Kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis masih rendah.
- b. Desain dan packaging kemasan yang belum memenuhi permintaan pasar.
- c. Peluang pembiayaan IKM yang masih lemah karena belum memenuhi standar kelayakan kredit pembiayaan perbankan.
- d. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.(termasuk packaging produk).
- e. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk bersaing di pasar nasional.
- f. Masih rendahnya penggunaan sarana prasarana mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk.

32. Urusan Transmigrasi

A. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Transmigrasi dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Transmigrasi								
1	Cakupan Penempatan Transmigran	%	90,00	97,57	108,41	95,00	NA	0,00	100,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina	%	97,57	97,57	100	60,75	48,6	80,00	65,42

B. Capaian Program

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menjalankan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	%	100	280.462.183	100	103.979.642	100	23.026.740	100,00
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%	100	174.134.760	100	60.000.000	100	17.071.500	100,00
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan permukiman yang mandiri	%	75	229.134.751	75	60.823.546	0	0	0,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Lakip OPD		85	67.472.017.170	80,00	22.043.454.621	77,48	15.337.053.501	97

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Sosial masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Permasalahan tersebut yaitu Belum optimalnya pembinaan bagi masyarakat transmigrasi.

D. Isu Strategis

Adapun Isu strategis pada Urusan Transmigrasi yaitu belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi.

33. Urusan Administrasi Pemerintahan

A. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Biro Perekonomian, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Biro Pemerintahan. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
SEKRETARIAT DAERAH									
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Administrasi Pemerintahan								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	100,00	BB	NA	0,00	BB
2	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,23	3,54	83,69	4,53	NA	0,00	4,55
3	Ranking Nasional LPPD	Ranking	7,00	NA	NA	5,00	NA	0,00	3,07
4	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	425,00	425,00	100,00
5	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,05	20,05	100,00
6	Persentase unit pelayanan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	28,00	NA	NA	34,00	NA	0,00	45,00
7	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	100,00	4,00
Biro Perekonomian									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	Dokumen	100	100	100	20	NA		20
2	Persentase Peningkatan Kontribusi Deviden BUMD	Dokumen	100	100	100	1,96	NA		1,96
Biro Hukum									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	%	100	100	100	100	240	240,00	100
2	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	%	100	100	100	100	52	52,00	100
3	Persentase Kasus Hukum Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	%	100	100	100	100	6	6,00	100
4	Persentase Kasus Hukum	%	100	100	100	100	1	1,00	100

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
	Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding								
5	Persentase Kasus Hukum Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	%	100	100	100	100	3	3,00	100
6	Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	%	100	100	100	100	1	1,00	100
7	Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di Web JDIIH Media Sosial	%	100	100	100	100	133	133,00	100
Biro Organisasi									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Perangkat Daerah yang disederhanakan Struktur Organisasi	%	100	100	100				
2	Nilai SAKIP	Level	BB (73,01 - 76,00)	BB	100,00	BB (76,01 - 80,00)	NA	0,00	A (80,01 - 90,00)
3	Nilai RB	Level	B	B	100,00	BB	NA	0,00	BB
4	Persentase Peta Proses Bisnis PD yang sesuai ketentuan	%	100	100	100				
Biro Umum									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Tingkat Kepuasan Layanan Kerumahantangan Pimpinan	Indeks/Skor (Predikat)	4 (puas)	4,458 (puas)	111,45	4,2 (Puas)	4,342 (Puas)	4,342 (Puas)	4,5 (Sangat Puas)
2	Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	100	100	100	75,00	75,00	100
3	Persentase Penatausahaan Aset Setda sesuai PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah	%	100	100	100	100	98,64	98,64	100
4	Persentase pemenuhan Layanan Ketatausahaan sesuai SOP Pemenuhan Layanan Ketatausahaan	%				100	79,00	79,00	100
5	Persentase Aset yang dimanfaatkan	%	80	98,5	123,13				
6	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pimpinan	%	100	100	100				
7	Tingkat layanan perencanaan, administrasi kepegawaian dan keuangan organisasi	%	100	100	100				
Biro Administrasi Pimpinan									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
1	Persentase layanan keprotokolkan KDH/WKDH sesuai standar	%	100	100	100	100	72,28	72,28	100
2	Persentase layanan Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan yang terfasilitasi sesuai standar	%	100	100	100	100	58,27	58,27	100
3	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	75,52	75,52	100
4	Persentase administrasi perencanaan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	68,25	68,25	100
Biro Administrasi Pembangunan									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%				75	75	100	100
2	Persentase Hasil Pengendalian Pembangunan	%	100	100	100				
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Pengendalian Pembangunan yang ditindak lanjuti	%	100	100	100				
Biro Pengadaan Barang dan Jasa									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	3	3	100	3	3	100	4
Biro Kesejahteraan Rakyat									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Bina Mental Spiritual Yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	56,62	100	100
2	Persentase Urusan Pelayanan Dasar Yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	0,00	100	100
3	Persentase Urusan Non Pelayanan Dasar Yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	0,00	100	100
4	Persentase Urusan Pelayanan Keagamaan Yang Terpenuhi	%	100	100	100				
Biro Pemerintahan									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja kUnci	%	100	100	100	100	100	100	100,000
2	Rangking Nasional LPPD	Ranking	100	100	100	100	20,05	20,05	100,000
3	Persentase kerjasama yang terealisasi (%)	%	100	100	100				

B. Capaian Program

Capaian program pada Pelaksanaan Urusan Administrasi Pemerintahan dirinci sebagai berikut:

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	persentase Kawasan Baru Transmigrasi	%	100	280.462.183	100	103.979.642	100	23.026.740	100,00
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%	100	174.134.760	100	60.000.000	100	17.071.500	100,00
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase satuan permukiman yang mandiri	%	75	229.134.751	75	60.823.546	0	0	0,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Lakip OPD		85	67.472.017.170	80,00	22.043.454.621	77,48	15.337.053.501	97

C. Permasalahan Dan Kendala

Dalam melaksanakan program pembangunan Urusan Administrasi Pemerintahan masih dihadapi permasalahan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program. Kendala tersebut dirinci berdasarkan Perangkat Daerah yang membawahi Urusan Administrasi Pemerintahan yaitu :

- 1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan sekurang-kurangnya Proaktif dapat mengajukan permohonan menjadi PKP-BJ.
 - b. Permohonan paling cepat 1 (satu) tahun setelah pencapaian tingkat kematangan
 - c. UKPBJ yang layak sebagai PKP-BJ akan diberikan sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ

Permasalahan Bagian Pengelolaan PBJ:

- a. Lambatnya penyampaian dokumen lelang oleh Perangkat Daerah
- b. Jumlah Anggota Pokja relative tidak sebanding dengan jumlah paket lelang
- c. Perangkat Daerah terlambat mengumumkan RUP melalui SIRUP
- d. Permohonan lelang sering menumpuk di Triwulan III dan IV
- e. Sarpras pendukung tupoksi terbatas
- f. SDM Pengelola PBJ terbatas

Permasalahan Bagian Pengelolaan LPSE:

- a. Sarpras LPSE belum Optimal (Server dan Ruang Server)
- b. Penginputan PL oleh Perangkat Daerah belum optimal
- c. Ketepatan waktu penyampaian data informasi tentang pelaksanaan program kegiatan dari perangkat daerah belum maksimal

Permasalahan Bagian Pembinaan dan Advokasi PBJ:

- a. Masih kurangnya anggaran untuk pembinaan ke Kabupaten/Kota
- b. Anggaran untuk pendampingan/Bimtek sering dipangkas

- c. Sarpras pendukung tupoksi terbatas
 - d. Pemanfaatan keberadaan TIM Clearing House belum dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD
 - e. Masih lambatnya perangkat daerah dalam perubahan akun PA, KPA, PPK dan admin SIRUP
 - f. Masih lemahnya pembinaan dan pendampingan UKPBJ terhadap pelaku pengadaan baik PAK/KPS, PPK, Pokmil dan penyedia untuk memahami Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan turunannya beserta aplikasi SPSE 4.5
- 2) Biro Organisasi
- a. Akuntabilitas kinerja mendorong komitmen pimpinan dan seluruh ASN dengan memastikan tercapainya target-target kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - b. Mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah agar menyempurnakan proses penjenjangan kinerja agar lebih menggambarkan proses terwujudnya kinerja utama yang akan dicapai titik proses tersebut harus menggambarkan strategis yang menggambarkan kausalitas pada setiap tahapan, langkah atau prakondisi dalam mencapai kinerja yang diinginkan
 - c. Proses penjenjangan kinerja harus menjadi momen untuk menyempurnakan struktur organisasi;
 - d. Meningkatkan komitmen pemerintah provinsi NTB untuk lebih optimal dalam mendorong penguatan SAKIP kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB agar terwujud kualitas implementasi sakit semakin baik, sehingga mampu mendorong komponen penilaian;
 - e. Memastikan penerapan anggaran yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah telah berbasis kinerja, dengan cara mensyaratkan keseluruhan unit kerja untuk merencanakan kinerja dan mempertanggungjawabkan kinerja atau mempertanggungjawabkan hasil sehingga mampu terlihat dan dirasakan; memastikan prioritas kegiatan/program;
 - f. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi baik tingkat perangkat daerah maupun provinsi NTT tersebut ditindaklanjuti untuk dapat menjadi perbaikan perencanaan kinerja, laporan dan evaluasi;
- 3) Biro Pemerintahan
- a. Masih lambatnya perangkat daerah dalam perubahan akun PA, KPA, PPK dan admin SIRUP
 - b. Masih lemahnya pembinaan dan pendampingan UKPBJ terhadap pelaku pengadaan baik PAK/KPS, PPK, Pokmil dan penyedia untuk memahami Perpres 16 Tahun 2018 dan Peraturan turunannya beserta aplikasi SPSE 4.5

D. Isu Strategis

Adapun Isu strategis pada Urusan Administrasi Pemerintahan dirinci berdasarkan Perangkat Daerah yang membawahi Urusan Administrasi Pemerintahan yaitu.

- 1) Biro Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. 2021 s.d 2023: Proses pelelangan pengadaan barang jasa belum optimal.
 - b. 2024 s.d 2026 : Perubahan Indikator yaitu dari Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif menjadi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
- 2) Biro Organisasi
 - a. Penataan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur belum optimal; ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya belum merata;
 - b. Pemahaman tim evaluator baik pusat dan daerah terkadang berbeda;

- c. Pengaruh hasil penilaian SAKIP belum signifikan berdampak kepada perangkat daerah sehingga masih banyak perangkat daerah dan individu yang menganggap sakit tidak penting;
 - d. Perbedaan pedoman dan kepentingan antara sistem perencanaan dan penilaian;
 - e. Koordinasi dan pembinaan yang masih belum maksimal baik ke perangkat daerah, kabupaten/kota;
 - f. Anggaran yang masih belum mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan yang direncanakan;
 - g. Penyempurnaan aplikasi e Anjab dan ABK disesuaikan dengan aplikasi SIMONA Anjab dari Kemendagri yang lebih komplit dan lebih mudah untuk menghitung beban kerja yang akan digunakan untuk urusan kepegawaian;.
- a. Biro Pemerintahan
 - c. Penyelenggaraan Pilpres Dan Pileg (Desk Pemilu)
 - d. Adanya Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pemilihan

34. Urusan Perencanaan

A. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

Usuran Perencanaan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Perencanaan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Usuran Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi i Tw III	% Tingkat Capaian	
BAPPEDA PROVINSI NTB									
1,1	Perencanaan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	0,00	100,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Konsistensi Antar Program Perencanaan	%	100	100	100	100	75	75	100
2	Persentase Renstra Organisasi Perangkat Daerah Yang Berkualitas	%	100	100	100	100	75	75	100
3	Persentase RPJMD Kabupaten/Kota Yang Berkualitas	%	100	100	100	100	75	75	100
4	Persentase Capaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah					70	25	35,71	70
5	Tingkat Capaian Program Strategis	%	100	78,77	78,77				
6	Tingkat Capaian Program Unggulan	%	100	76,28	76,28				
7	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Daerah	%	100	58,25	58,25				

B. Capaian Program

Bappeda Provinsi NTB menjalankan 3 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Evaluasi Yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan	%			100	4.779.893.285	79	1.550.940.302	78,57
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah Dengan Rkpd	%			100	12.519.651.738	50	2.676.879.487	50,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%			100	21.939.338.429		19.256.245.421	0,00

35. Urusan Keuangan

A. Capaian Kinerja Urusan Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Keuangan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
BPKAD PROVINSI NTB									
1,1	Keuangan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual	%	100	100	100				
2	Persentase Tindak Lanjut Penghapusan Aset Daerah	%	100	100	100				
3	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan	%	70,8	69,45	98,09				
4	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang terlegalkan	%	82	81,07	98,87				

B. Capaian Program

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB menjalankan 3 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Termasuk : NTB WTP).

Uraian Variabel yang di Ukur	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		TAHUN 2022					Tingkat Capaian Kinerja s.d trw 3 (%)
			Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi			
	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Keuangan	Realisasi Keuangan (%)	Kinerja	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			A	27.148.210.373	24.289.916.970	65,54		70,54
Program Pengelolaan Keuangan Daerah			100	15.958.939.919	557.957.989.919	63,06		68,06
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Termasuk : NTB WTP)			70	1.532.229.968	1.420.430.980	66,67		71,67

C. Permasalahan Dan Kendala

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPKAD Provinsi NTB adalah:

- Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIMDA BPKP, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- Penyusunan LKPD yang lamban sebagai akibat dari lambatnya proses rekonsiliasi aset internal Pengguna Barang di perangkat daerah maupun antara pengguna barang dengan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
- Masih terdapat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tidak sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi NTB atas Raperda APBD/APBDP dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Kontribusi pemanfaatan aset terhadap peningkatan PAD belum maksimal.
- Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD khususnya retribusi daerah tidak mencapai target yang ditetapkan
- Kurangnya kompetensi SDM aparatur yang melaksanakan penatausahaan BMD di perangkat daerah

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Keuangan antara lain:

- Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah pusat
- Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum optimal
- Realisasi penerimaan daerah dari pemanfaatan aset daerah masih terdampak pandemic Covid-19
- Usulan penghapusan BMD oleh perangkat daerah diajukan menjelang akhir tahun anggaran
- Proses percepatan persertifikatan tanah yang bersumber dari P3D terhambat akibat belum lengkapnya dokumen pendukung
- Masih terdapat temuan dari Pemeriksa eksternal (BPK-RI) yang belum ditindak lanjuti

36. Urusan Kepegawaian

A. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Kepegawaian dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
BKD PROVINSI NTB									
1,1	Kepegawaian								
	Indikator Kinerja Daerah								
1	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,68	0,69	100,88	0,70	NA	0,00	0,72
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah								
1	Nilai Penerapan Merit Sistem					347,5	287	82,59	373
2	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	Point	90	90	100				
3	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	25	25	100				
4	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	Point	51,5	51,5	100				
5	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Point	112,5	112,5	100				
6	Persentase laporan LHKPN yang tepat waktu (%)	%	100	100	100				

B. Capaian Program

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Kepegawaian Daerah.

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen	300	71.546.278.229	100	24.730.042.732	85	9.439.635.462	85
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapapan Sistem Merit	point	373	9.963.416.983	347,5	3.469.095.726	287	785.909.770,00	82,59

C. Isu Strategis

Isu Manajemen aparatur Tahun 2022 antara lain:

- Penataan Perencanaan kebutuhan pegawai yang dioptimalisasi didukung data yang komprehensif
- Penguatan Perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi serta terkait dengan pola karier.

- c. Penataan promosi, mutasi, dan rotasi berbasis kompetensi dan pola karier menggunakan mekanisme yang jelas, akuntabel, dan transparan
- d. Peningkatan objektifitas penilaian kinerja individu terkait dengan tunjangan kinerja yang diberikan
- e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan secara tegas dan akuntabel
- f. Pengelolaan jabatan yang mendukung terwujudnya organisasi berbasis kinerja belum optimal
- g. Peningkatan kapasitas sistem informasi kepegawaian sehingga semakin andal dan informatif, serta terintegrasi dengan sistem lain
- h. Penerapan manajemen talenta yang terintegrasi dengan sistem merit

37. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

A. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019–2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
BPSDM PROVINSI NTB									
1,1	Pendidikan dan Pelatihan								
	Indikator Kinerja Daerah								
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00	0,27	0,17	62,96	0,28
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah								
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00	0,27	0,17	62,96	0,28

B. Capaian Program

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Kepegawaian Daerah.

Uraian Variabel Yang Di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Di Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan		Capaian Kinerja		
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi i Kinerja	Realisasi Keuangan	
Urusan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Opd	%	100	48.664.761.402	100	15.979.039.482,90	70	12.159.926.183	70,00
Urusan 2: Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Termasuk : Manajemen Talenta, Agen Perubahan)	Persentase Asn Bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.041	0,09	16.960.960.997,79	0,07	2.153.425.580	74,81
	Persentase Asn	%	0,04		0,04		0,07		100

Uraian Variabel Yang Di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target Di Dokumen Perencanaan Yang Ditetapkan		Capaian Kinerja		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi i Kinerja	Realisasi Keuangan	
	Bersertifikat Kompetensi Fungsional								
	Persentase Asn Bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,14		0,03		21
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,59		0		0

C. Permasalahan Dan Kendala

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPSDM Provinsi NTB adalah:

- SPD tidak seluruhnya dikeluarkan oleh BPKAD
- Sarana dan prasarana pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun e-learning yang kurang memadai
- Belum tersusunnya regulasi tentang pengembangan kompetensi 1 pintu

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Proses perumusan Isu strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan mereka. Adapun Isu strategis pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah Penanganan GAP Kompetensi ASN dapat diatasi dengan peningkatan kompetensi sebagai upaya menuju Good Government dalam menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, & Ambiguity) WoG dan revolusi industri 4.0.

38. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

A. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
	BPSDM PROVINSI NTB								
1,1	Pendidikan dan Pelatihan								
	Indikator Kinerja Daerah								
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00	0,27	0,17	62,96	0,28

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,25	0,25	100,00	0,27	0,17	62,96	0,28

B. Capaian Program

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Kepegawaian Daerah.

Uraian Variabel Yang Di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan Pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)	
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Di Dokumen Perencanaan yg Ditetapkan		Capaian Kinerja			
					Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan		
Urusan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Opd	%	100	48.664.761.402	100	15.979.039.482,90	70	12.159.926.183	70,00	
Urusan 2: Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Termasuk : Manajemen Talenta, Agen Perubahan	Persentasi Asn Bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.041	0,09	16.960.960.997,79	0,07	2.153.425.580	74,81	
	Persentase Asn Bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,04		0,07			100
	Persentase Asn Bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,14		0,03			21
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,59		0			0

C. Permasalahan Dan Kendala

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPSDM Provinsi NTB adalah:

- SPD tidak seluruhnya dikeluarkan oleh BPKAD
- Sarana dan prasarana pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun e-learning yang kurang memadai
- Belum tersusunnya regulasi tentang pengembangan kompetensi 1 pintu

b. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan adalah Penanganan GAP Kompetensi ASN dapat diatasi dengan peningkatan kompetensi sebagai upaya menuju Good Government dalam menghadapi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, & Ambiguity) WoG dan revolusi industri 4.0.

39. Urusan Penelitian dan Pengembangan

A. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana

strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
BRIDA PROVINSI NTB									
1,1	Perencanaan								
Indikator Kinerja Daerah									
1,2	Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan (lokus NTB)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indeks Inovasi Daerah	point	Sangat inovatif	Sangat inovatif	100	75,67			76,00
	Persentase rekomendasi hasil kelibangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100			34,78			37,14
	Rasio kapasitas sumber daya iptek daerah	point	100			183,56			186,56
	Persentase wirausaha berbasis inovasi, teknologi & digitalisasi	%				24			30
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase rekomendasi hasil kelibangan dan inovasi yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%				34,78			37,14
2	Rasio kapasitas sumber daya iptek daerah	point				183,56			186,56
3	Persentase wirausaha berbasis inovasi, teknologi & digitalisasi	%				24			30

B. Capaian Program

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program Kepegawaian Daerah.

Uraian Variabel yang diukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		
					Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian nilai sakuip terhadap target	%	100	13.864.162.215	100	11.118.907.890	BB	1.666.262.291	0
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	%	100	54.940.838.000	65,22	33.740.838.900	51	14.803.157.650	77,49

C. Permasalahan Dan Kendala

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BRIDA Provinsi NTB adalah:

- a. Ekosistem Penelitian dan Inovasi belum terintegrasi
- b. Hasil kajian kelitbangan belum maksimal dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan pembangunan.
- c. Pemanfaatan teknologi dan inovasi belum maksimal.
- d. Kompetensi Sumber daya manusia belum maksimal.

D. Isu Strategis

Isu strategis pada Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah :

- a. Optimalisasi pemanfaatan hasil kajian kelitbangan dan inovasi teknologi dalam pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya iptek mendukung pembangunan daerah.
- c. Optimalisasi inkubasi StartUP berbasis Tekonologi Informasi/Digitalisasi mendukung Industri 4.0.
- d. Optimalisasi peran sumber daya aparatur peneliti.
- e. Optmalisasi pemanfaatan aset Brida sebagai kawasan industri.

40. Urusan Penghubung

A. Capaian Kinerja Urusan Penghubung

Urusan Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Penghubung dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI NTB									
1,1	Penghubung								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Jumlah SDM yang memiliki sertifikat/piagam kompetensi					15	15	100	20
2	Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik					80	80	100	85
3	Angka Kunjungan wisma dan anjungan NTB di TMII					41.000	3.711	9,05	43.000
4	Tingkat kepuasan pelayanan tamu wisma NTB	%	75	75	100	80			85
5	Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung anjungan NTB di TMII	%	75	75	100	75			

B. Capaian Program

Badan Penghubung Provinsi NTB menjalankan 1 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, Yaitu Program Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

Uraian Variabel yang di Ukur	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan				
		Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Kinerja	Keuangan	
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			556.750.000,00		556.750.000,00		190.564.000,00	

C. Permasalahan Dan Kendala

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi NTB adalah:

- Masih rendahnya angka menginap di Wisma NTB yang mengakibatkan rendahnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari ritribusi wisma NTB.
- Angka kunjungan anjungan rendah diakibatkan adanya larangan berkumpul akibat adanya covid -19 meskipun tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan kementerian kesehatan.

41. Urusan Pengawasan

A. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Pengawasan dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
INSPEKTORAT PROVINSI NTB									
1,1	Pengawasan								
Indikator Kinerja Daerah									
1	Nilai SAKIP	Kategori	BB (73,01 - 76,00)	BB	100,00	BB (76,01 - 80,00)	NA	0,00	A (80,01 - 90,00)
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	100,00	BB	NA	0,00	BB
3	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
1	Persentase Penurunan Nilai kerugian Daerah / Negara	%	4	13,34	333,5	4	NA	0	
2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	74	74	100,0	76	74,57	98,12	
3	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP
4	Persentase OPD yang bebas temuan keuangan materil	%	100	100	100,0	100	100	100	100
5	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Terdefinisi (Level III)	Level III	100,0	Terdefinisi (level III)	Terdefinisi (level III)	100	Terkelola, Terukur (level IV)
6	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Integrated (Level III)	Level III	100,0	Integrated (Level III)	Integrated (Level III)	100	Managed (Level IV)
7	Persentase PD yang memperoleh nilai implementasi SAKIP BB - AA	%	90	83	92,2	95	100	105,26	100

B. Capaian Program

Inspektorat Provinsi NTB menjalankan 2 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Penyelenggaraan Pengawasan, dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Uraian Variabel yang diukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir Perencanaan pada Tahun 2023		2022		Realisasi		Tingkat Capaian Kinerja (%)
			Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yg ditetapkan		Kinerja	Keuangan	
					Target Kinerja	Target Pagu			
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah per Wilayah Binaan Inspektorat Pembantu	%	48,89		44,44		0	592.955.440	0,0
	Persentase Permintaan ADTT oleh APH yang ditindaklanjuti	%	90		85		73,96	117.178.800	87
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat Waktu								
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Perangkat Daerah								
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP						100	38.205.000	100
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Menyusun Laporan Keuangan Sesuai SAP						100	37.305.000,00	100,0
Program 1 : Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai MCP di Atas Rata-rata Nasional							Rp -	
	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	4,55					Rp -	

C. Permasalahan Dan Kendala

Identifikasi Permasalahan yang Berpotensi menurunkan pencapaian Program Unggulan SAKIP & WTP adalah:

- Komitmen Pimpinan OPD untuk bersungguh-sungguh dalam implementasi SAKIP masih harus ditingkatkan. Disinyalir masih ada beberapa Kepala OPD yang belum sepenuhnya memahai SAKIP ditandai dengan melakukan perbaikan SAKIP hanya pada saat evaluasi KemenPAN dan Inspektorat saja.
- Rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan Akuntabilitas Kinerja baik pada level Pemda maupun OPD
- Pemanfaatan e-kinerja belum optimal, belum terintegrasi dalam rangka pemantauan kinerja oleh pimpinan, sehingga data kinerja belum dapat dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment
- Pergantian personil yang menangani SAKIP pada Perangkat Daerah menyebabkan pembinaan SAKIP yang telah dilakukan menjadi tidak berkesinambungan
- Reviu RPJMD dan Renstra harus dilakukan secara berkala, untuk melihat apakah terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian kembali.

Identifikasi Permasalahan yang Berpotensi menurunkan pencapaian Program Unggulan SAKIP & WTP:

- Masih ditemukan adanya pelaksanaan program kegiatan yang belum sepenuhnya mengacu DPA dan ketentuan lainnya.
- Keselarasan antar dokumen perencanaan masih harus ditingkatkan. Masalah ini masih ditemukan meskipun sudah terlihat perbaikan signifikan pada tahun terakhir.

Renja, RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA harus benar benar integratif. Oleh karena itu perlu memastikan kondisi ini dengan kegiatan pengawasan rutin melalui reviu dokumen perencanaan.

- c. Penyelesaian Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus sungguh sungguh menjadi atensi OPD. dua tahun terakhir (LKPD), masalah ini masih menjadi temuan BPK, terutama pada Dinas Dikbud yang memiliki karakteristik kekhasan permasalahan pengelolaan keuangan sekolah. SMA dan SMK yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi jumlahnya relatif sangat banyak. Ini membutuhkan kerja keras untuk perbaikan manajemen / pengelolaan dana sekolah ini melalui peningkatan intensitas pendampingan, pembinaan dan pengawasan lainnya.

D. Isu Strategis

Adapun Isu strategis pada Urusan Pengawasan adalah :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah.
- b. Akselerasi Tindak lanjut hasil pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan penurunan nilai kerugian Negara / Daerah.
- c. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Pemenuhan Kapabilitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

42. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023 dan rencana strategis Perangkat Daerah 2019-2023, pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat diukur capaiannya sampai dengan triwulan III Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama Perangkat Daerah/Urusan Pemerintahan/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021			2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian	Target	Realisasi Tw III	% Tingkat Capaian	
BAKESBANGPOL PROVINSI NTB									
1,1	Kesatuan Bangsa dan Politik								
	Indikator Kinerja Daerah								
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,85	10,67	128,15	14,05	NA	0,00	13,25
2	Partisipasi Politik Masyarakat	%	83,74	NA	NA	84,57	NA	0,00	85,20
3	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	30,00	NA	NA	40,00	NA	0,00	50,00
4	Persentase penurunan konflik sosial	%	16,67	25,00	149,97	20,00	NA	0,00	0,00
5	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,46	NA	NA	4,67	NA	0,00	4,89
6	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,80	0,61	76,25	0,90	NA	0,00	1,00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah									
	Persentase keberhasilan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial	%	80	100	125	75	NA	0	75
	Persentase masyarakat yang mendapat pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	%	1,7	0,64	37,65	1,7	NA	0	1,7

B. Capaian Program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB menjalankan 6 program prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Termasuk : Sekolah Perjumpaan), Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (Termasuk Desa Bersinar), Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik (Termasuk Bale Mediasi).

Uraian Variabel yang di Ukur	Inikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	A	8.278.005.921	A	7.456.451.797,16		1.599.330.296	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (Termasuk : Sekolah Perjumpaan)	Persentase pembinaan ideologi wawasan dan Karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	562.456.541	10	506.635.308,62		8.160.000	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	%	100	33.671.239.086	90	5.103.432.344,89		2.896.567.000	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Aktif	%	70	1.600.137.061	65	1.535.613.939,39		170.000.000	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (Termasuk Desa Bersinar)	Persentase Desa bersinar	%	77,5	848.629.511	76,67	764.406.924,04		41.200.000	

Uraian Variabel yang di Ukur	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja (%)
					Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Realisasi		
			Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
Bersinar)									
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik (Termasuk Bale Mediasi)	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	3.191.596.561	10,53	2.785.524.366,40		781.750.000	

C. Permasalahan Dan Kendala

Identifikasi Permasalahan yang terjadi dalam urusan kebangsaan dan politik antara lain:

- Potensi konflik dan kerawanan social marak terjadi dalam masyarakat
- Prevelensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- Mulai terkikisnya rasa nasionalisme dan krisis kebangsaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa
- Partisipasi aktif ormas/LSM dan parati .
- Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesbangpol yang belum memadai.

D. Isu Strategis

Adapun Isu strategis pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

- Potensi konflik dan kerawanan social ancaman instabilitas\Prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- Optimalisasi implementasi makna wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan masyarakat
- Optimalisasi peran ormas dan parpol dalam pembangunan
- Ketersediaan sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesbangpol.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.314.948.070.058 dengan realisasi sebesar Rp. 3.028.183.475.184 atau 47,95 persen.
4. Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan III tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 74,09 persen dengan capaian keuangan sebesar 73,75 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yang sebesar 39,66 persen untuk capaian kinerja, dan 32,99 persen untuk capaian keuangan.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 15 indikator atau 40,54 persen telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 8 indikator atau 21,62 persen belum mencapai target, Sisanya sebanyak 14 indikator atau 37,84 persen belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase konektivitas transportasi public, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase Balita Stunting, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan Kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi,

Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, dan Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

6. Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 30 indikator atau 29,13 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 30 indikator yang lain atau 29,13 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 43 indikator atau 41,75 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

7. Pada awal tahun 2022 telah dilakukan 2 kali perubahan Peraturan Gubernur terkait penjabaran APBD Tahun 2022 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Perubahan pertama terkait pembentukan BRIDA yang mengakibatkan adanya pengalihan anggaran dari beberapa Perangkat Daerah untuk dialihkan ke BRIDA. Perubahan kedua yaitu adanya refocusing anggaran untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2021 pada seluruh Perangkat Daerah.